

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LKIP Tahun 2018 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja selama tahun 2018 atau tahun ke-5 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2018 ditetapkan 9 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Kesembilan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;
2. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah;
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan ;
6. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah;
7. Menigkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah;
8. Menigkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja;
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM).

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja pada tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan;;

3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelolaan pendapatan.

Pencapaian Rencana Stratejik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 755.350.741.825,00 dengan realisasi sebesar Rp. 730.805.265.616,00 (96,75%) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	363.004.227.336,00	341.129.121.645,00	93,97
Belanja Tidak Langsung	392.346.514.489,00	359.676.143.971,00	99,32
Total Biaya	755.350.741.825,00	730.805.265.616,00	96,75

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih kembali Opin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut yang ketujuh kali pada tahun 2018.

Dengan diraihnya kembali Opin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, Maret 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sumber segala ilmu pengetahuan dan akal budi yang diberikan kepada insan abdi negara dan abdi masyarakat karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2018 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2018.

LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKIP yang merupakan bagian dari SAKIP, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga dapat menjadi pangkal tolak sebagai bahan penyusunan serta implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada periode berikutnya.

Dengan disusunnya LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat serta melalui laporan kinerja ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang pendapatan daerah, sehingga dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LKIP TA 2018 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pertolongan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Perubahan dari UUD No. 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

- Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 15. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060.04/189/Org Tanggal 25 Januari 2017 Perihal Penyusunan LKIP Tahun 2018.

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendapatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Badan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Kepegawaian

- b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Perlengkapan
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - a. Subbidang Regulasi dan Kerjasama
 - b. Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan
 - c. Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja
- 4. Bidang Pendapatan I
 - a. Subbidang Pendapatan dan Penetapan
 - b. Subbidang Layanan dan Keberatan
 - c. Subbidang Pembukuan dan Penagihan
- 5. Bidang Pendapatan II
 - a. Subbidang Pendataan dan Penerimaan I
 - b. Subbidang Pendataan dan Penerimaan II
 - c. Subbidang Pendataan dan Penerimaan III
- 6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - a. Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Sumber : bapenda.jabarprov.go.id)

Core Business Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Sumber Daya Manusia

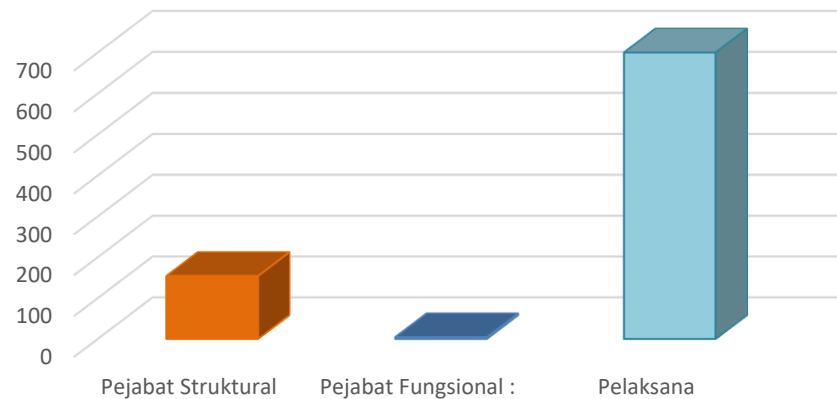
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S.1 sebanyak 360 orang (42.45%), SLTA sebanyak 241 orang (28.42%), S.2 sebanyak 187 orang (22.05%), D.III sebanyak 29 orang (3.42%), SMP sebanyak 15 orang (1.77%), SD sebanyak 13 orang (1.53%) dan S.3 sebanyak 3 orang (0.35%).

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pejabat Struktural	152 orang	17,92
2.	Pejabat Fungsional : Arsiparis	3 orang	0,35
3.	Pelaksana	693 orang	81,72
	Total	848 orang	100,00

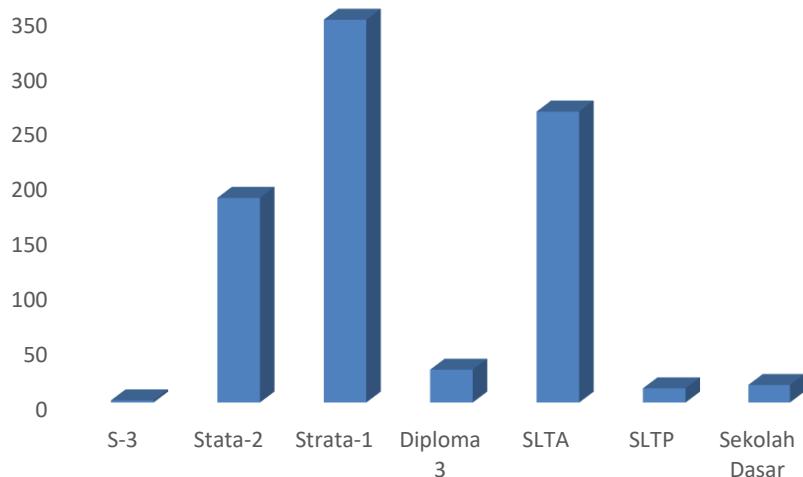
1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan



2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

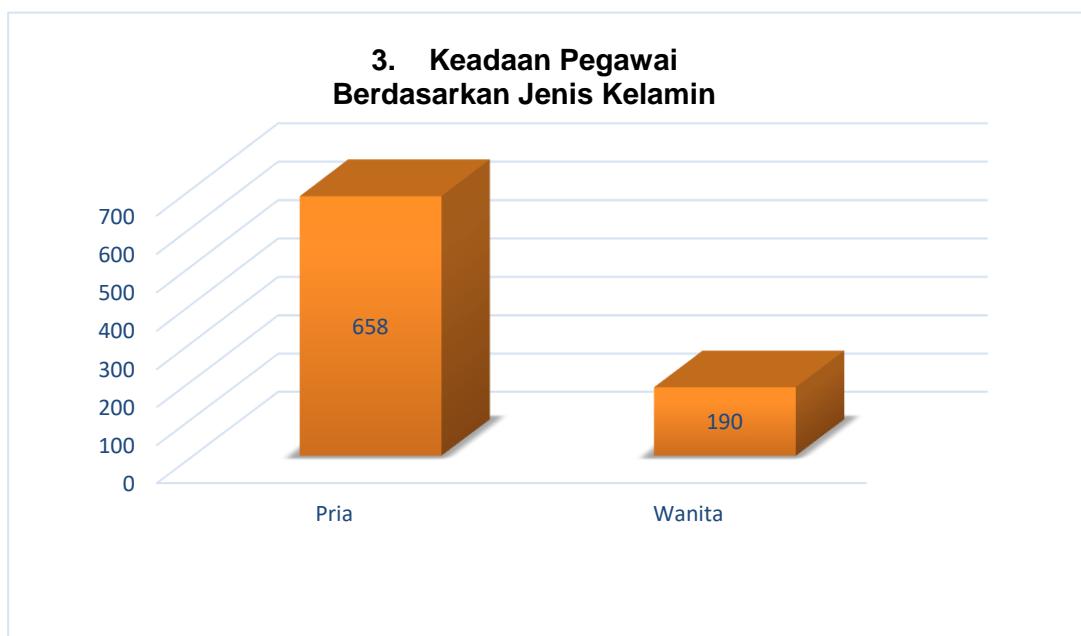
No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	S-3	3	0,35
2.	Stata-2	187	22,05
3.	Strata-1	360	42,45
4.	Diploma 3	29	3,42
5.	SLTA	241	28,42
6.	SLTP	15	1,77
7.	Sekolah Dasar	13	1,53
8.	Jumlah	848	100,00

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



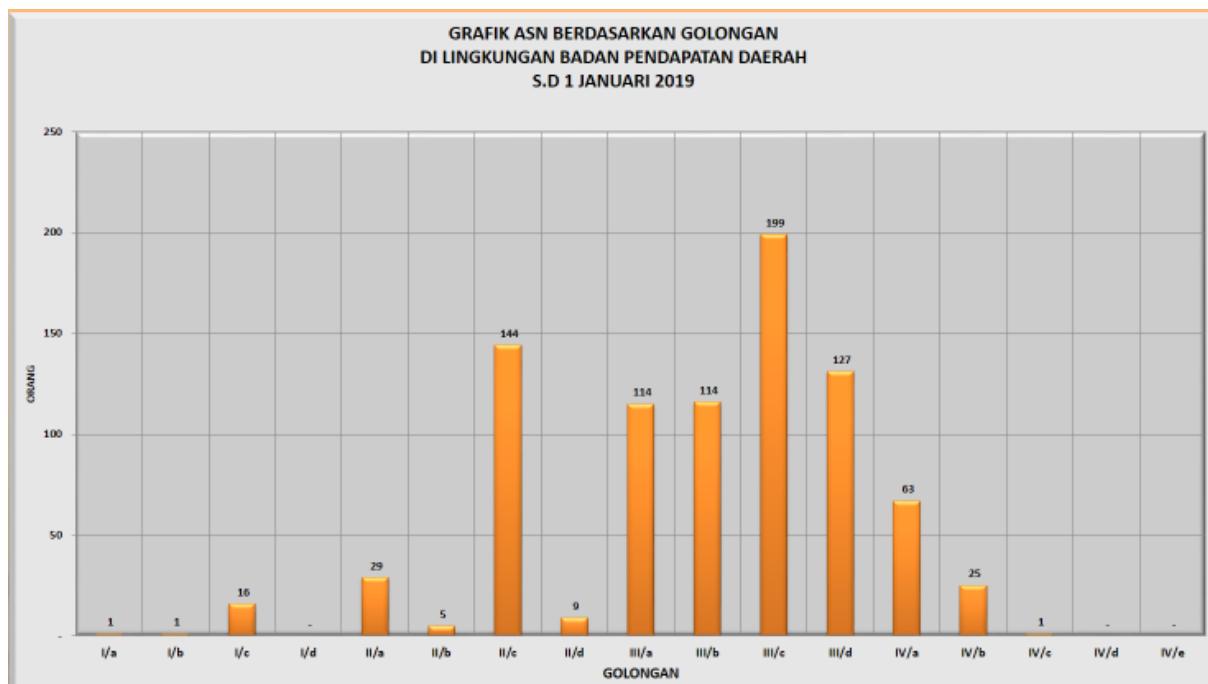
3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pria	658	77,59
2.	Wanita	190	22,41
	Jumlah	848	100,00



4. Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Golongan I	18	2,12
2.	Golongan II	187	22,05
3.	Golongan III	554	65,33
4.	Golongan IV	89	10,50
	Jumlah	848	100



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II **PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Indikator Kinerja Utama
- 3) Cascading
- 4) Pohon Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan badan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan jangka panjang daerah provinsi Jawa Barat yaitu "**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, dan penyempurnaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pendapatan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2013 - 2018, maupun dalam kebijakan strategis bidang pendapatan daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi organisasi pada tahun 2013-2018.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dijewi oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah
dan Akuntabel**

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing**

2.1.2 Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Badan Pendapatan Daerah Yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang makin Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan Penerimaan Daerah yang makin optimal, dengan Sasaran : tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Yaitu :
 - a) Kenaikan pendapatan daerah antara tahun anggaran
 - b) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran :
 - a) Terdatanya potensi Pajak Daerah dan bukan Pajak Daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Air Permukaan
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Jumlah Wajib Retribusi
 - b) Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah

- c) Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Potensi wajib pajak yang terpungut
 - 2) Potensi Wajib Retribusi yang terpungut
 - 3) Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

Untuk Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi :

- 1. Meningkatkan kemampuan Aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - a) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - b) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional
 - c) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
- 2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya :
 - 1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran.
 - 2) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan
 - 3) Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan
 - c) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Tingkat gangguan jaringan dan sistem
 - 2) Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi Informasi
- 3. Memantafkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Sinergitas antar institusi pengelolaan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Prosentase perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan
 - b) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya
 - 1) Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)
 - 2) Jumlah temuan SPI antar tahun
 - 3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Internal pengawasan
 - 4) Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh instansi Penilai

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2013-2018 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
- c. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
- d. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- e. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- f. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
- g. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;
- h. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
- i. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
- j. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- k. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder;
- l. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- m. Memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi;
- n. Menerapkan SOP yang makin teruji;
- o. Melakukan standarisasi srapras pengelolaan pendapatan;
- p. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik;
- q. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- r. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- s. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

2. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapainnya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;

- b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
- c. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
- d. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan;
- f. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
- g. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan dan retribusi;
- h. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
- i. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
- j. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
- k. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
- l. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh Perangkat Daerah penghasil;
- m. Menyempurnakan *system reward* pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
- n. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- o. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
- p. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;
- q. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas (t – Samsat) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan lainnya) ;
- r. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
- s. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
- t. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan PT. Jasa Raharja serta Perbankan daerah;
- u. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji;

Keterkaitan visi, misi hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Rencana kinerja pada hakikatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 10

(sepuluh) program dan 841 (delapan ratus empat puluh satu) kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Program 100 Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
2. Program 101 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
3. Program 102 Pengembangan Kompetensi Aparatur
4. Program 103 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
5. Program 107 Pembinaan Dan Pengawasan
6. Program 109 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7. Program 110 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
8. Program 111 Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program 98 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
10. Program 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 10 (sepuluh) program dan 841 (delapan puluh sati) kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut :

Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Tabel Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran 2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (di luar Dana BOS)	10% 86%
2.	Terdatanya Potensi Pajak Daerah dan Bukan Pajak Daerah	1. Jumlah Potensi Wajib Pajak: a. PKB b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar 2. Jumlah Wajib Retribusi 3. Jumlah Objek Penerimaan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18,4 Juta Kbm 785 WP 28 Wapu 170 WR 35 Objek
3.	Efektifnya Pemungutan seluruh Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Potensi Wajib Pajak yang Terpungut 2. Persentase Potensi Wajib Retribusi yang Terpungut 3. Persentase Objek Penerimaan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Terpungut/Diterima	75% 90% 100%
4.	Meningkatnya Kualitas SDM	1. Persentase Aparatur yang telah Mengikuti Pendidikan Formal 2. Persentase Aparatur yang telah Mengikuti Pendidikan Teknis Substantif 3. Persentase Aparatur yang telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	S1 = 35,2% S2 = 19,2% 79% 13%
5.	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8%

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pengguna Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
6.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik yang Menopang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah terhadap Wajib Pajak yang dilayani per Hari Kerja antar Tahun Anggaran 2. Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap Kebutuhan 3. Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan terhadap Kebutuhan	1:200 100% 100%
7.	Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah	1. Persentase Tingkat Gangguan Jaringan dan Sistem 2. Persentase Tingkat Gangguan Penggunaan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,2% 1,2%
8.	Meningkatnya Sinergitas antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	90%

Didukung oleh 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	650.850.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	2.294.525.000	APBD
3.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	739.000.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	34.584.088.250	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	350.725.000	APBD
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	6.768.236.750	APBD
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.287.400.000	APBD
8.	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	55.619.566.384	APBD
9.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	178.072.431.499	APBD
10.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.637.404.453	APBD
Jumlah		Rp. 363.004.227.336	

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 23 Sasaran Strategis ditetapkan 9 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

2.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 841 (delapan ratus empat puluh satu) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
055	001	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, MEDIA MASSA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	650.850.000	606.702.975	93.22
055	002	Pengembangan Aplikasi Switching E-Samsat	90.750.000	90.149.600	99.34
055	003	Kajian Sistem Jaringan Komputer Berbasis Virtual Local Area Network	59.250.000	58.683.000	99.04
055	004	Kajian Software Quality Assurance Untuk Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	59.250.000	58.542.500	98.81
055	005	Kajian Sistem Informasi Pada Sistem Informasi Bapenda	59.250.000	58.480.500	98.70
055	006	Teknik Penerapan Tik Pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerahprovinsi Jawa Barat	95.500.000	95.346.500	99.84
055	007	Pengembangan Aplikasi Integrasi System	90.750.000	90.056.600	99.24
055	008	Penyusunan Aplikasi Business Process Improvment	90.750.000	90.248.500	99.45
097	001	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	2.294.525.000	1.923.736.525	83.84
097	002	Rapat Kerja Pendapatan Daerah	868.175.000	779376700	89.77
097	003	Kegiatan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan	1.426.350.000	1144359825	80.23
098	004	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	739.000.000	71.5041.550	96.76

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
097	005	Kegiatan Dokumen Kinerja Tahunan	739.000.000	715041550	96.76
100	100	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	28.984.539.308	25.347.411.162	87.45
100	001	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	43.815.000	43.815.000	100.00
100	002	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	90.900.000	90.900.000	100.00
100	003	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	-	-	#DIV/0!
100	004	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Subang	51.500.000	51.500.000	100.00
100	005	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	6.980.000	6.980.000	100.00
100	006	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	156.525.000	156.525.000	100.00
100	007	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	50.000.000	50.000.000	100.00
100	008	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
100	009	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	2.876.800	2.876.800	100.00
100	010	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	73.080.000	72.825.500	99.65
100	011	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	16.310.000	16.310.000	100.00
100	012	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haureulis	7.745.000	7.745.000	100.00
100	013	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
100	014	Pendataan Dan Penerimaan I	276.000.000	272.239.057	98.64
100	015	Kajian Regulasi Pendapatan Dan Rapat Kerjasama Pendapatan Tahun Anggaran 2018	812.500.000	691.112.450	85.06
100	016	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	47.200.000	47.200.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	017	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	4.800.000	4.800.000	100.00
100	018	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	72.982.500	71.944.500	98.58
100	019	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	5.847.000	5.847.000	100.00
100	020	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	37.280.000	36.280.000	97.32
100	021	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	94.050.000	94.050.000	100.00
100	022	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	-	-	#DIV/0!
100	023	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	3.000.000	3.000.000	100.00
100	024	Intensifikasi Pemungutan Pajak Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Banjar	47.817.500	47.817.500	100.00
100	025	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	-	-	#DIV/0!
100	026	Sosialisasi Dan Monitoring Pajak Daerah	583.900.000	550.285.475	94.24
100	027	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	39.800.000	39.358.306	98.89
100	028	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	-	-	#DIV/0!
100	029	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	51.350.000	51.350.000	100.00
100	030	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	17.992.500	17.992.500	100.00
100	031	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	10.897.650	10.897.650	100.00
100	032	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Brat	86.980.000	86.980.000	100.00
100	033	Kegiatan Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat	2.355.105.250	2.073.719.900	88.05
100	034	Kajian Analisa Realisasi Dan Proyeksi Potensi Pendapatan Daerah	233.900.000	209.433.500	89.54

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	035	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	2.192.600	2.192.600	100.00
100	036	Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Wilayah Jawa Barat	1.054.425.000	997.799.575	94.63
100	037	Pendataan Dan Penerimaan li	326.000.000	322.329.308	98.87
100	038	Pendataan Dan Penerimaan iii	446.840.000	445.504.111	99.70
100	039	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Pangandaran	10.080.000	10.080.000	100.00
100	040	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	107.820.000	107.820.000	100.00
100	041	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	94.430.000	93.830.000	99.36
100	042	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bekasi	10.161.000	10.161.000	100.00
100	043	Kegiatan Penyusunan Sop	150.000.000	130.588.300	87.06
100	044	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	871.070.000	766.087.000	87.95
100	045	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	546.750.000	533.950.000	97.66
100	046	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	1.122.520.000	798.718.500	71.15
100	047	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	779.800.000	768.766.170	98.59
100	048	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	562.970.000	555.380.000	98.65
100	049	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	666.720.000	515.330.000	77.29
100	050	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	634.720.000	629.493.500	99.18
100	051	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	783.820.000	769.215.750	98.14
100	052	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	926.820.000	842.924.500	90.95

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	053	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	831.409.000	671.117.500	80.72
100	054	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1.043.670.000	941.404.000	90.20
100	055	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	925.580.000	664.209.000	71.76
100	056	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	886.975.000	866.775.750	97.72
100	057	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	659.160.500	626.691.000	95.07
100	058	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	738.314.000	684.145.000	92.66
100	059	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	675.080.000	659.145.680	97.64
100	060	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	860.193.200	731.751.500	85.07
100	061	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	841.555.000	653.548.500	77.66
100	062	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	618.705.000	507.126.500	81.97
100	063	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	826.741.000	709.118.500	85.77
100	064	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.069.097.400	1.048.241.800	98.05
100	065	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	996.590.000	922.035.000	92.52
100	066	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1.068.280.000	1.052.448.600	98.52
100	067	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.047.390.000	934.942.500	89.26
100	068	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1.046.670.000	1.001.960.200	95.73
100	069	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.094.377.500	949.727.000	86.78
100	070	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	684.690.000	657.234.000	95.99

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
100	071	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	912.222.350	803.037.950	88.03
100	072	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	769.948.000	595.727.500	77.37
100	073	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	511.170.000	415.317.500	81.25
100	074	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	642.660.000	629.239.000	97.91
100	075	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	537.640.000	523.170.000	97.31
100	076	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	521.390.000	508.313.500	97.49
100	077	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	396.307.500	381.445.000	96.25
101	101	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	350.725.000	320.743.750	91.45
101	001	Evaluasi Hasil Kinerja Dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	350.725.000	320.743.750	91.45
103	103	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	6.768.236.750	5.896.784.860	87.12
103	001	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	2.737.700.000	2.448.950.760	89.45
103	002	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	4.030.536.750	3.447.834.100	85.54
107	107	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.287.400.000	1.213.368.550	94.25
107	001	Pemeriksaan, Pemutakhiran, Dan Pendampingan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.233.600.000	1.160.292.650	94.06
107	002	Pembinaan Dan Kepatuhan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	53.800.000	53.075.900	98.65
109	109	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	55.619.566.384	51.918.687.627	93.35
109	001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	9.577.000	9.577.000	100.00
109	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Di CPPD Wilayah Kota Sukabumi	11.360.000	11.360.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	003	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Di CPPD Wilayah Kota Sukabumi	5.000.000	5.000.000	100.00
109	004	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.830.000	1.830.000	100.00
109	005	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	1.930.000	1.930.000	100.00
109	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya	-	-	#DIV/0!
109	007	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	40.220.000	40.069.000	99.62
109	008	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	400.000	400.000	100.00
109	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	60.507.494	60.507.494	100.00
109	010	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	8.225.000	8.225.000	100.00
109	011	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	32.628.680	32.628.680	100.00
109	012	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	22.015.000	22.015.000	100.00
109	013	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	34.757.525	34.757.525	100.00
109	014	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	11.700.000	11.700.000	100.00
109	015	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	1.864.600	1.864.600	100.00
109	016	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	11.372.955	11.372.955	100.00
109	017	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabng Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	-	-	#DIV/0!
109	018	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon	-	-	#DIV/0!
109	019	Kegiatan Penyediaan Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	14.444.376	14.444.376	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	020	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	-	-	#DIV/0!
109	021	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon	2.150.000	2.150.000	100.00
109	022	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	15.405.000	15.405.000	100.00
109	023	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1.973.000	1.973.000	100.00
109	024	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	88.697.200	88.697.200	100.00
109	025	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	58.175.553	58.175.553	100.00
109	026	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	12.700.000	12.700.000	100.00
109	027	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
109	028	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Beserta Peralatannya Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	57.200.000	53.857.506	94.16
109	029	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	16.159.328	16.159.328	100.00
109	030	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	154.400.675	154.400.675	100.00
109	031	Kegiatan Pemeliharaan Perabot, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	7.080.000	7.080.000	100.00
109	032	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon	-	-	#DIV/0!
109	033	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	-	-	#DIV/0!
109	034	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	8.577.694	8.577.694	100.00
109	035	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	22.232.159	22.232.159	100.00
109	036	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	35.362.000	35.362.000	100.00
109	037	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	10.150.000	10.150.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	038	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	60.036.702	60.036.702	100.00
109	039	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	2.701.300	2.701.300	100.00
109	040	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	12.500.000	12.500.000	100.00
109	041	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	900.000	900.000	100.00
109	042	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bekasi	-	-	#DIV/0!
109	043	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di CPPD Provinsi Wilayah Kab. Ciamis	13.344.500	12.825.554	96.11
109	044	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	9.221.950	9.221.950	100.00
109	045	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	10.730.000	10.730.000	100.00
109	046	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1.150.000	1.150.000	100.00
109	047	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Wil.Kab.Bandung II Soreang	19.940.000	19.940.000	100.00
109	048	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor	7.450.000	7.450.000	100.00
109	049	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	10.720.500	10.720.500	100.00
109	050	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.860.000	1.860.000	100.00
109	051	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	7.200.000	7.200.000	100.00
109	052	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	59.272.504	59.272.504	100.00
109	053	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor	-	-	#DIV/0!
109	054	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	13.806.355	13.806.355	100.00
109	055	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	3.409.400	3.409.400	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	056	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	-	-	#DIV/0!
109	057	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas CPPD Provinsi Wilayah Kota Bogor	10.935.801	10.935.801	100.00
109	058	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor	-	-	#DIV/0!
109	059	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bekasi	-	-	#DIV/0!
109	060	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	12.022.561	12.022.561	100.00
109	061	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	76.235.961	76.235.961	100.00
109	062	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya.	11.100.000	11.100.000	100.00
109	063	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Kantor CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	83.126.476	83.126.475	100.00
109	064	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	49.412.404	49.412.404	100.00
109	065	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	8.505.548	8.505.548	100.00
109	066	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	11.690.000	11.690.000	100.00
109	067	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten II Ciledug	7.913.000	7.913.000	100.00
109	068	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	31.395.300	31.395.300	100.00
109	069	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	8.910.000	8.910.000	100.00
109	070	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	-	-	#DIV/0!
109	071	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	72.400.000	72.400.000	100.00
109	072	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	26.968.000	26.968.000	100.00
109	073	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Kantor CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	3.013.000	3.013.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	074	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	6.546.700	6.546.700	100.00
109	075	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	11.317.600	11.317.600	100.00
109	076	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	4.500.000	4.365.000	97.00
109	077	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	7.915.000	7.915.000	100.00
109	078	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	3.400.000	3.400.000	100.00
109	079	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bekasi	13.132.692	13.132.692	100.00
109	080	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	54.735.198	54.735.198	100.00
109	081	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	4.100.000	4.025.000	98.17
109	082	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	6.320.000	6.320.000	100.00
109	083	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	3.000.000	3.000.000	100.00
109	084	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	5.500.000	5.500.000	100.00
109	085	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	10.450.000	10.450.000	100.00
109	086	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	3.083.000	3.083.000	100.00
109	087	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya.	10.158.325	10.158.325	100.00
109	088	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	28.820.000	28.102.440	97.51
109	089	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya CPPD Kota Bandung II Kawaluyaan	98.733.412	98.733.412	100.00
109	091	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	2.490.000	2.490.000	100.00
109	092	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	093	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor CPPD Kota Bandung II Kawaluyaan	5.075.000	5.075.000	100.00
109	094	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Depok I	8.625.000	8.625.000	100.00
109	095	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas CPPD Kota Bandung II Kawaluyaan	8.950.000	8.950.000	100.00
109	096	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di CPPD Prov. Wil. Kota Depok I	61.921.686	61.921.686	100.00
109	097	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	6.825.000	6.825.000	100.00
109	098	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	38.184.000	38.184.000	100.00
109	099	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di CPPD Prov. Wil. Kota Depok I	6.150.000	6.150.000	100.00
109	100	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	7.540.000	7.540.000	100.00
109	101	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	8.055.499	8.055.499	100.00
109	102	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1.141.600	1.141.600	100.00
109	103	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi	6.357.000	6.357.000	100.00
109	104	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	57.628.500	57.628.500	100.00
109	105	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	7.100.000	7.100.000	100.00
109	106	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di CPPD Provinsi Wil. Kota Depok I	-	-	#DIV/0!
109	107	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	640.000	640.000	100.00
109	108	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	23.269.700	23.269.700	100.00
109	109	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	8.850.000	8.850.000	100.00
109	110	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi	20.555.000	20.555.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu			
109	111	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	2.000.000	2.000.000	100.00
109	112	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor CPPD Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	-	-	#DIV/0!
109	113	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	89.132.000	86.871.000	97.46
109	114	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	8.690.355	8.690.355	100.00
109	115	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	109.644.000	109.644.000	100.00
109	116	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	5.000.000	5.000.000	100.00
109	117	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	2.700.000	2.700.000	100.00
109	118	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	15.610.000	15.610.000	100.00
109	119	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	57.862.900	57.862.900	100.00
109	120	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	8.042.500	8.042.500	100.00
109	121	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.158.501	1.158.501	100.00
109	122	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.199.700	1.199.700	100.00
109	123	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	2.500.000	2.500.000	100.00
109	124	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	-	-	#DIV/0!
109	125	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	84.263.004	84.263.004	100.00
109	126	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	2.118.998	2.118.998	100.00
109	127	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.200.000	1.200.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	128	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	600.000	600.000	100.00
109	129	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	7.900.000	7.900.000	100.00
109	130	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	8.467.500	8.467.500	100.00
109	131	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	8.789.000	8.789.000	100.00
109	132	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	-	-	#DIV/0!
109	133	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	8.699.844	8.699.844	100.00
109	134	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	-	-	#DIV/0!
109	135	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
109	136	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor D CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
109	137	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
109	138	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	67.190.804	67.190.804	100.00
109	139	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	3.165.474.093	3.047.181.869	96.26
109	140	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.037.877.100	888.424.600	85.60
109	141	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	3.361.920.000	3.165.608.475	94.16
109	142	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	5.046.785.000	4.887.998.641	96.85
109	143	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	-	-	#DIV/0!
109	144	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas Dan Gedung Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	-	-	#DIV/0!
109	145	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	24.200.000	21.199.110	87.60

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	146	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	588.678.314	515.210.124	87.52
109	147	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	151.791.500	104.033.600	68.54
109	148	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Depok I	88.875.000	86.300.000	97.10
109	149	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	30.180.000	29.888.800	99.04
109	150	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	487.866.000	443.739.000	90.96
109	151	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	58.244.501	56.979.148	97.83
109	152	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	1.542.584.000	1.498.111.000	97.12
109	153	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	176.800.000	167.550.000	94.77
109	154	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	1.665.929.325	1.072.733.025	64.39
109	155	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	303.638.000	172.563.400	56.83
109	156	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	734.668.406	650.035.000	88.48
109	157	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	8.200.000	8.150.000	99.39
109	158	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	319.900.000	319.900.000	100.00
109	159	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	113.164.199	68.599.194	60.62
109	160	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	70.100.000	37.250.000	53.14
109	161	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	33.000.000	33.000.000	100.00
109	162	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	348.180.000	347.140.000	99.70
109	163	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	63.440.000	61.662.200	97.20

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	164	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	681.084.000	665.934.500	97.78
109	165	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	101.893.000	53.719.200	52.72
109	166	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	29.200.000	28.977.000	99.24
109	167	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	530.600.000	521.988.000	98.38
109	168	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	498.756.000	494.360.000	99.12
109	169	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	21.300.000	21.000.000	98.59
109	170	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	444.305.000	442.917.000	99.69
109	171	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	87.509.645	85.748.070	97.99
109	172	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	174.550.000	174.520.000	99.98
109	173	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	45.282.048	24.575.000	54.27
109	174	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	35.700.000	35.505.200	99.45
109	175	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	89.799.500	83.256.319	92.71
109	176	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	247.520.000	246.030.000	99.40
109	177	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	62.070.000	61.770.000	99.52
109	178	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	1.551.663.123	1.549.363.121	99.85
109	179	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	94.775.000	93.518.100	98.67
109	180	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	1.666.564.799	1.639.130.290	98.35

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	181	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	13.400.000	10.676.000	79.67
109	182	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	818.739.628	813.785.626	99.39
109	183	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	102.027.308	59.533.111	58.35
109	184	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	215.294.000	205.615.000	95.50
109	185	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	14.000.000	3.180.000	22.71
109	186	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	434.809.196	434.771.172	99.99
109	187	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	97.850.000	71.205.900	72.77
109	188	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	80.000.000	74.235.500	92.79
109	189	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	13.750.000	13.590.000	98.84
109	190	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	381.902.800	381.652.800	99.93
109	191	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	60.540.672	58.400.826	96.47
109	192	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	557.850.000	549.589.000	98.52
109	193	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	14.715.000	13.860.000	94.19
109	194	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	461.787.596	439.920.182	95.26
109	195	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	94.149.700	83.206.400	88.38
109	196	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	646.833.000	640.245.000	98.98
109	197	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	54.000.000	53.857.500	99.74

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	198	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	451.634.624	440.753.912	97.59
109	199	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	47.127.000	24.069.215	51.07
109	200	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	386.031.000	378.095.000	97.94
109	201	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	17.400.000	17.271.500	99.26
109	201	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	404.600.000	403.732.000	99.79
109	203	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	45.390.000	42.890.007	94.49
109	204	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	63.300.000	53.414.000	84.38
109	205	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	399.305.000	389.151.747	97.46
109	206	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	48.073.500	33.232.500	69.13
109	207	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	419.779.000	398.710.535	94.98
109	208	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	16.232.500	16.138.000	99.42
109	209	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	411.800.000	411.549.000	99.94
109	210	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	89.107.841	52.616.386	59.05
109	211	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	137.710.000	135.821.750	98.63
109	212	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	403.000.000	398.238.900	98.82
109	213	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	123.551.045	70.060.703	56.71
109	214	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	737.385.000	677.475.000	91.88
109	215	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan	89.150.000	74.990.000	84.12

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan			
109	216	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	446.039.500	398.740.500	89.40
109	217	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	174.193.645	38.323.392	22.00
109	218	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	751.270.000	591.132.000	78.68
109	219	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	81.500.000	80.838.200	99.19
109	220	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	308.488.000	287.775.200	93.29
109	221	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	75.792.499	27.393.147	36.14
109	222	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	543.460.000	451.326.000	83.05
109	223	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	32.400.000	21.930.500	67.69
109	224	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	671.317.302	614.704.446	91.57
109	225	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	101.517.000	69.975.000	68.93
109	226	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	407.739.000	406.194.200	99.62
109	227	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	392.728.000	387.470.700	98.66
109	228	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	509.466.588	486.893.766	95.57
109	229	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	19.600.000	19.197.500	97.95
109	230	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	98.750.000	83.598.700	84.66
109	231	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	20.855.600	20.783.775	99.66

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	232	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	432.716.549	432.685.500	99.99
109	233	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	62.023.152	61.949.053	99.88
109	234	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	792.348.600	785.737.250	99.17
109	235	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	34.050.000	32.504.100	95.46
109	236	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	399.763.758	379.819.426	95.01
109	237	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	74.149.800	52.871.018	71.30
109	238	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.622.814.200	1.580.182.200	97.37
109	239	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	445.473.524	444.724.160	99.83
109	240	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	94.350.000	84.799.372	89.88
109	241	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	367.390.000	363.548.000	98.95
109	242	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	44.626.150	44.494.600	99.71
109	243	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	10.170.000	10.114.627	99.46
109	244	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	412.480.000	409.284.800	99.23
109	245	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	53.448.700	35.062.870	65.60
109	246	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	328.575.000	301.084.100	91.63
109	247	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	36.800.300	35.024.150	95.17
109	248	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	430.491.468	428.079.938	99.44

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	249	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	76.001.002	37.871.193	49.83
109	250	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	102.600.000	88.386.000	86.15
109	251	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	46.000.000	45.655.000	99.25
109	252	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	407.492.506	369.194.832	90.60
109	253	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	74.222.306	45.131.164	60.81
109	254	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	894.281.500	875.452.000	97.89
109	255	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	28.682.400	19.000.000	66.24
109	256	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	308.867.496	302.947.772	98.08
109	257	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	85.922.000	71.225.100	82.90
109	258	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	620.086.675	614.705.000	99.13
109	260	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	10.000.000	9.950.000	99.50
109	261	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	336.268.510	336.156.750	99.97
109	262	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	163.854.300	139.055.200	84.87
109	263	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	355.300.000	325.652.000	91.66
109	264	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	307.250.000	284.920.663	92.73
109	265	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis Wilayah Kabupaten Ciamis	90.156.459	76.633.154	85.00
109	266	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	7.405.000	6.570.000	88.72

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
109	267	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	304.462.000	287.845.000	94.54
109	268	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	42.500.000	42.410.000	99.79
109	269	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	426.457.439	394.943.060	92.61
109	270	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	165.710.000	140.154.737	84.58
109	271	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	1.016.131.000	983.642.060	96.80
109	272	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	28.658.400	26.784.700	93.46
109	273	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	394.277.500	375.073.500	95.13
109	274	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	106.540.000	65.094.104	61.10
109	275	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	623.550.000	596.208.100	95.62
109	276	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	63.098.000	50.619.000	80.22
109	277	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	15.165.000	15.165.000	100.00
109	278	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	227.595.000	216.883.420	95.29
109	279	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	183.175.000	174.474.500	95.25
109	280	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	174.835.400	172.337.200	98.57
109	281	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	297.456.624	292.501.366	98.33
109	282	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	122.278.050	84.165.000	68.83
109	283	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas, Dan Gedung Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	650.400.000	609.931.186	93.78
110	110	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	178.072.431.499	173.252.548.938	97.29

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	-	#DIV/0!
110	1.	Pengadaan Komputer Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	-	-	#DIV/0!
110	2.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	-	-	#DIV/0!
110	3.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Bogor	-	-	#DIV/0!
110	4.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Subang	-	-	#DIV/0!
110	5.	Pengadaan Kontruksi Bangunan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Subang	-	-	#DIV/0!
110	6.	Pembangunan Gedung Pendukung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	-	-	#DIV/0!
110	7.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	16.500.000	16.500.000	100.00
110	8.	Pengadaan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	-	-	#DIV/0!
110	9.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	3.956.000	3.956.000	100.00
110	10.	Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	-	-	#DIV/0!
110	11.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	900.000	884.825	98.31
110	12.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	-	-	#DIV/0!
110	13.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	-	-	#DIV/0!
110	14.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	-	-	#DIV/0!
110	15.	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Tasikmalaya	-	-	#DIV/0!
110	16.	Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
110	17.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	12.000.000	12.000.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	18.	Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	-	-	#DIV/0!
110	19.	Pengadaan Konstruksi Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	-	-	#DIV/0!
110	20.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
110	21.	Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
110	22.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	-	-	#DIV/0!
110	23.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	-	-	#DIV/0!
110	24.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	-	-	#DIV/0!
110	25.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	-	-	#DIV/0!
110	26.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	-	-	#DIV/0!
110	27.	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	-	-	#DIV/0!
110	28.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di CPPD Prov Wil Kab Bandung I Rancaekek	-	-	#DIV/0!
110	29.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	-	-	
110	30.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di CPPD Prov Wil Kab Bandung I Rancaekek	-	-	
110	31.	Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	-	-	#DIV/0!
110	32.	Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	-	-	#DIV/0!
110	33.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	12.235.000	12.235.000	100.00
110	34.	Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar.	-	-	#DIV/0!
110	35.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	36.	Pengadaan Kontruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	-	-	#DIV/0!
110	37.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	-	-	
110	38.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	-	-	#DIV/0!
110	39.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	-	-	#DIV/0!
110	40.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	-	-	#DIV/0!
110	41.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	-	-	#DIV/0!
110	42.	Kegiatan Komputer Di Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	-	-	#DIV/0!
110	43.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	-	-	#DIV/0!
110	44.	Kegiatan Pembangunan Bangunan Non Kontruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	-	-	#DIV/0!
110	45.	Pengadaan Komputer CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	-	-	#DIV/0!
110	46.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	11.392.000	11.392.000	100.00
110	47.	Pembangunan Gedung Tahap II Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
110	48.	Pengadaan Kontruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	35.160.880.936	33.591.923.250	95.54
110	49.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Jabar	-	-	#DIV/0!
110	50.	Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Di Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	-	-	#DIV/0!
110	51.	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	-	-	#DIV/0!
110	52.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	-	-	#DIV/0!
110	53.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di CPPD Prov. Wil. Kota Depok I	5.971.200	5.971.200	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	54.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	-	-	#DIV/0!
110	55.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	-	-	#DIV/0!
110	56.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere.	-	-	#DIV/0!
110	57.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	600.000	547.000	91.17
110	58.	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Tahap II	-	-	#DIV/0!
110	59.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	-	-	#DIV/0!
110	60.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	-	-	#DIV/0!
110	61.	Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Di CPPD Wilayah Kota Sukabumi	-	-	#DIV/0!
110	62.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	-	-	#DIV/0!
110	63.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	-	-	#DIV/0!
110	64.	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	-	-	#DIV/0!
110	65.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	-	-	#DIV/0!
110	66.	Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	-	-	#DIV/0!
110	67.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kot Bogor	-	-	#DIV/0!
110	68.	Pengadaan Komputer, Laptop Dan Printer Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	-	-	#DIV/0!
110	69.	Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta	-	-	#DIV/0!
110	70.	Penyusunan Ded Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	-	-	#DIV/0!
110	71.	Pengadaan Bangunan Konstruksi Bangunan Bukan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	72.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di CPPD Wilayah Kota Sukabumi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	-	-	#DIV/0!
110	73.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	-	-	#DIV/0!
110	74.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bukan Bangunan Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	-	-	#DIV/0!
110	75.	Pengadaan Konstruksi CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	-	-	#DIV/0!
110	76.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	-	-	#DIV/0!
110	77.	Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	-	-	#DIV/0!
110	78.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	-	-	#DIV/0!
110	79.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Kantor Cabang Pelayanan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	12.034.500	12.034.500	100.00
110	80.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta.	-	-	#DIV/0!
110	81.	Pengadaan Konstruksi Di Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	2.968.000	2.968.000	100.00
110	82.	Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta.	-	-	#DIV/0!
110	83.	Pengadaan Komputer Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	-	-	#DIV/0!
110	84.	Pengadaan Komputer Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	46.548.031.000	46.147.298.450	99.14
110	85.	Pembangunan Sarana Penunjang Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	#DIV/0!
110	86.	Pembangunan Pelayanan Samsat Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	-	-	#DIV/0!
110	87.	Penyusunan Ded Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Bekasi	1.244.001.000	1.233.913.000	99.19
110	88.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	-	-	#DIV/0!
110	89.	Kegiatan Peningkatan Kontruksi Di CPPD Wilayah Kota Sukabumi	5.500.000	5.500.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	90.	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Tahap Ii	-	-	#DIV/0!
110	91.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	-	-	#DIV/0!
110	92.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di CPPD Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	-	-	#REF!
110	93.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di CPPD . Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	-	-	
110	94.	Pengadaan Konstruksi Di CPPD . Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	-	-	#DIV/0!
110	95.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	426.001.372	398.788.200	93.61
110	96.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	107.300.000	90.700.000	84.53
110	97.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	677.666.116	666.035.000	98.28
110	98.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	518.800.000	471.479.800	90.88
110	99.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	40.000.000	39.442.000	98.61
110	100.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	2.866.690.000	2.670.745.137	93.16
110	101.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	232.000.000	183.877.000	79.26
110	102.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	81.300.000	72.300.000	88.93
110	103.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	207.500.000	203.162.000	97.91
110	104.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	173.550.000	168.447.000	97.06
110	105.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	40.000.000	38.975.000	97.44
110	106.	Kegiatan Peningkatan Kontruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	1.248.270.000	1.226.847.200	98.28
110	107.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	61.500.000	61.000.000	99.19

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	108.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	40.000.000	39.400.000	98.50
110	109.	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	198.675.000	196.649.000	98.98
110	110.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	881.974.000	867.003.400	98.30
110	111.	Kegiatan Pembangunan Bangunan Non Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	34.500.000	33.800.000	97.97
110	112.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	92.500.000	90.928.000	98.30
110	113.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	766.029.000	749.536.500	97.85
110	114.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	7.431.724.723	7.399.179.466	99.56
110	115.	Kegiatan Pembangunan Pelayanan Samsat Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	178.800.000	172.271.000	96.35
110	116.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	870.300.000	617.844.569	70.99
110	117.	Kegiatan Penyusunan Ded Pembangunan Gedung Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	749.458.500	738.877.000	98.59
110	118.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	2.334.900.000	1.756.621.150	75.23
110	119.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	5.393.438.200	5.266.062.200	97.64
110	120.	Kegiatan Pembangunan Gedung Tahap Ii Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	232.765.500	225.818.300	97.02
110	121.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	48.740.000	36.960.000	75.83
110	122.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	305.097.000	299.026.000	98.01
110	123.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	553.200.000	512.572.700	92.66
110	124.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang	227.010.000	224.625.000	98.95
110	125.	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang	113.600.000	112.214.000	98.78

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	126.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang	568.895.000	547.850.000	96.30
110	127.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	738.113.200	727.807.000	98.60
110	128.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	98.800.000	89.900.000	90.99
110	129.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	1.320.079.500	1.260.459.789	95.48
110	130.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	165.323.000	165.323.000	100.00
110	131.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	2.011.547.280	1.977.980.850	98.33
110	132.	Kegiatan Pembangunan Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	47.000.000	42.851.500	91.17
110	133.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	40.000.000	39.340.000	98.35
110	134.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	148.000.000	138.850.000	93.82
110	135.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	140.000.000	135.123.000	96.52
110	136.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	36.000.000	35.460.000	98.50
110	137.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	66.228.200	63.351.000	95.66
110	138.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	4.093.260.522	3.987.618.691	97.42
110	139.	Kegiatan Pembangunan Gedung Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	809.300.000	799.019.100	98.73
110	140.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	248.600.000	211.884.000	85.23
110	141.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	4.788.279.400	4.401.660.600	91.93
110	142.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	154.515.000	146.760.000	94.98
110	143.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	25.000.000	24.092.100	96.37

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	144.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	300.800.000	299.300.000	99.50
110	145.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	64.225.700	64.225.700	100.00
110	146.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	131.046.000	130.466.000	99.56
110	147.	Kegiatan Pengadaan Kontruksi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	270.300.000	265.752.000	98.32
110	148.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	131.600.000	131.550.000	99.96
110	149.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	280.350.000	276.910.000	98.77
110	150.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bukan Bangunan Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daeraprovinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	575.000.000	571.850.000	99.45
110	151.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	268.862.478	268.862.478	100.00
110	152.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	92.445.000	92.445.000	100.00
110	153.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	37.343.370	34.000.000	91.05
110	154.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	965.540.878	951.016.600	98.50
110	155.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	283.933.000	271.240.000	95.53
110	156.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	28.000.000	27.650.000	98.75
110	157.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	29.700.000	19.555.500	65.84
110	158.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	-	-	#DIV/0!
110	159.	Kegiatan Penyusunan Ded Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	447.793.800	443.097.600	98.95
110	160.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	53.500.000	50.947.000	95.23
110	161.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	142.360.000	111.461.000	78.30

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	162.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	17.239.646.000	17.161.467.300	99.55
110	163.	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	23.900.000	21.910.900	91.68
110	164.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	378.500.000	329.078.100	86.94
110	165.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	156.300.000	145.855.700	93.32
110	166.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	40.000.000	39.653.000	99.13
110	167.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	418.240.000	413.130.700	98.78
110	168.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	15.000.000	14.398.000	95.99
110	169.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1.159.800.000	1.150.889.600	99.23
110	170.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	239.880.000	233.140.000	97.19
110	171.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	58.500.000	48.250.000	82.48
110	172.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	40.000.000	39.380.000	98.45
110	173.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	482.400.000	460.520.900	95.46
110	174.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	1.857.852.000	1.856.015.600	99.90
110	175.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	238.300.000	219.921.100	92.29
110	176.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	856.950.000	808.612.050	94.36
110	177.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	81.500.000	76.986.400	94.46
110	178.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	295.981.000	287.782.400	97.23
110	179.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	206.500.000	152.952.600	74.07

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
110	180.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	106.859.000	101.249.350	94.75
110	181.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	40.000.000	39.546.000	98.87
110	182.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	18.288.262.348	18.171.792.320	99.36
110	183.	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	1.270.351.512	1.224.941.300	96.43
110	184.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	4.276.913.264	4.240.014.763	99.14
110	185.	Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	230.696.000	227.741.500	98.72
110	186.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	298.100.000	293.350.000	98.41
111	111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.637.404.453	74.029.678.938	89.58
111	1.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	6.707.000	6.707.000	100.00
111	2.	Penyediaan Barang Habis Pakai Di CPPD Wil.Bandung II Soreang	17.451.000	17.451.000	100.00
111	3.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di CPPD Wil.Kab.Bandung II Soreang	58.395.200	58.395.200	100.00
111	4.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Di CPPD Wil.Kab.Bandung II Soreang	-	-	#DIV/0!
111	5.	Kegiatan Penyediaan Bahan Pakai Habis Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	13.764.700	13.764.700	100.00
111	6.	Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	70.075.200	70.075.200	100.00
111	7.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Di CPPD Prov. Wil. Kota Depok I	-	-	#DIV/0!
111	8.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	27.670.000	27.670.000	100.00
111	9.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	9.323.933	9.323.933	100.00
111	10.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	11.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	13.181.565	13.181.565	100.00
111	12.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	-	-	#DIV/0!
111	13.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis No Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	26.947.200	26.947.200	100.00
111	14.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	15.692.454	15.692.454	100.00
111	15.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	843.000.000	840.000.000	99.64
111	16.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	39.782.800	39.782.800	100.00
111	17.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	23.868.880	23.868.880	100.00
111	18.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	66.130.920	66.130.920	100.00
111	19.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	23.764.350	23.764.350	100.00
111	20.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	41.240.500	41.240.500	100.00
111	21.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	18.543.400	18.543.400	100.00
111	22.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	9.610.000	9.610.000	100.00
111	23.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	41.459.300	41.459.300	100.00
111	24.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	39.460.570	39.460.570	100.00
111	25.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilaya Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	18.950.000	18.950.000	100.00
111	26.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	15.211.000	15.211.000	100.00
111	27.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	28.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	42.623.500	42.623.500	100.00
111	29.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor CPPD Wilayah Kabupaten Bogor	77.881.881	77.881.881	100.00
111	30.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	58.902.392	58.902.392	100.00
111	31.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	-	-	#DIV/0!
111	32.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	36.787.787	36.787.787	100.00
111	33.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.500.000	1.500.000	100.00
111	34.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	70.000.000	70.000.000	100.00
111	35.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	11.400.000	11.400.000	100.00
111	36.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	2.992.000	2.992.000	100.00
111	37.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	7.924.000	7.799.000	98.42
111	38.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	11.461.546	11.461.546	100.00
111	39.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bekasi	58.769.040	58.769.040	100.00
111	40.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.275.200	1.275.200	100.00
111	41.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	69.099.379	67.850.465	98.19
111	42.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	14.554.500	14.551.500	99.98
111	43.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	78.058.700	78.058.700	100.00
111	44.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1.200.000	1.200.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	45.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	9.476.013	9.476.013	100.00
111	46.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	9.175.318	9.175.318	100.00
111	47.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	57.312.938	57.312.938	100.00
111	48.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	45.480.829	45.480.829	100.00
111	49.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	5.377.900	5.377.900	100.00
111	50.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Kuningan	19.106.800	19.106.800	100.00
111	51.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	26.436.500	26.436.500	100.00
111	52.	Kegiatan Sewa Publikasi Dan Dokumentasi Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1.605.000	1.605.000	100.00
111	53.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	6.040.200	6.040.200	100.00
111	54.	Kegiatan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	8.665.400	8.665.400	100.00
111	55.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	65.047.000	65.047.000	100.00
111	56.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	1.750.000	1.750.000	100.00
111	57.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	6.251.250	6.251.250	100.00
111	58.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Non Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayana Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	33.602.404	33.602.404	100.00
111	59.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	11.624.978	11.624.978	100.00
111	60.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	42.560.238	42.560.238	100.00
111	61.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	3.000.000	3.000.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	62.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di Cabang Pelayanan Penapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	16.840.000	16.840.000	100.00
111	63.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	69.363.500	69.363.500	100.00
111	64.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	30.127.000	30.127.000	100.00
111	65.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.000.000	1.000.000	100.00
111	66.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	1.600.000	1.600.000	100.00
111	67.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Kerja Teknis Non Pegawai Di CPPD Prov. Wil. Kota Depok I	56.338.996	55.562.752	98.62
111	68.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan	155.130.671	155.130.671	100.00
111	69.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bogor	174.674.900	174.674.900	100.00
111	70.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	18.401.000	18.401.000	100.00
111	71.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	38.671.500	38.671.500	100.00
111	72.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Bogor	57.614.000	57.613.931	100.00
111	73.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya.	13.288.500	13.288.500	100.00
111	74.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	15.843.700	15.843.700	100.00
111	75.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	34.380.000	34.380.000	100.00
111	76.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	14.903.800	14.903.800	100.00
111	77.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bogor	3.650.000	3.650.000	100.00
111	78.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1.200.000	1.200.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	79.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	-	-	#DIV/0!
111	80.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bogor	34.768.500	34.764.896	99.99
111	81.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	17.182.000	17.182.000	100.00
111	82.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	32.907.000	32.907.000	100.00
111	83.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya.	22.178.310	22.178.310	100.00
111	84.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	44.454.500	44.454.500	100.00
111	85.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	168.898.446	166.583.446	98.63
111	86.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	51.036.480	51.036.480	100.00
111	87.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	26.465.640	26.465.640	100.00
111	88.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	37.134.600	36.093.208	97.20
111	89.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	4.021.500	4.021.500	100.00
111	90.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya.	-	-	#DIV/0!
111	91.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	-	-	#DIV/0!
111	92.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1.584.000	1.584.000	100.00
111	93.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	-	-	#DIV/0!
111	94.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	29.489.500	28.837.800	97.79
111	95.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	56.365.000	56.365.000	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	96.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	760.000	760.000	100.00
111	97.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	42.273.214	42.273.214	100.00
111	98.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	49.040.000	47.449.000	96.76
111	99.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	17.381.000	17.379.500	99.99
111	100.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di CPPD Prov Wil Kabupaten Bandung I Rancaekek	34.700.000	34.060.000	98.16
111	101.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	36.859.500	36.859.500	100.00
111	102.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	23.955.000	23.955.000	100.00
111	103.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	-	-	#DIV/0!
111	104.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	28.383.838	28.383.838	100.00
111	105.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor CPPD . Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	118.800.000	118.800.000	100.00
111	106.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor CPPD . Prov. Wil. Kab. Tasikmalaya	59.679.000	59.679.000	100.00
111	107.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	56.722.500	44.478.000	78.41
111	108.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	4.628.925	4.628.925	100.00
111	109.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	33.848.692	33.848.692	100.00
111	110.	Kegiatan Penyediaan Langanan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Majalengka	28.375.175	28.374.647	100.00
111	111.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	52.169.000	52.169.000	100.00
111	112.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	-	-	#DIV/0!

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	113.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	10.865.000	10.865.000	100.00
111	114.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kab. Bandung Barat	19.001.000	18.401.000	96.84
111	115.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	34.324.336	34.324.336	100.00
111	116.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	22.373.700	22.373.700	100.00
111	117.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.000.000	1.000.000	100.00
111	118.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	31.906.000	31.906.000	100.00
111	119.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	-	-	#DIV/0!
111	120.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	58.057.838	58.057.838	100.00
111	121.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur	50.886.576	50.886.576	100.00
111	122.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	26.081.380	26.081.380	100.00
111	123.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1.810.000	1.810.000	100.00
111	124.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	15.941.701	15.941.701	100.00
111	125.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	11.844.915	11.844.915	100.00
111	126.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	59.473.800	59.473.800	100.00
111	127.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	60.000.000	60.000.000	100.00
111	128.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi	48.439.524	48.439.524	100.00
111	129.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	52.478.458	52.478.458	100.00

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	130.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	13.058.691	13.058.691	100.00
111	131.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	59.330.247	59.330.247	100.00
111	132.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	-	-	#DIV/0!
111	133.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	7.480.796.394	4.695.152.725	62.76
111	134.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	29.565.061.175	26.679.443.700	90.24
111	135.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	990.000.000	947.699.060	95.73
111	136.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	3.665.000.000	3.292.732.970	89.84
111	137.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	23.665.000	23.665.000	100.00
111	138.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	24.117.000	24.117.000	100.00
111	139.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	250.000	250.000	100.00
111	140.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	58.320.500	58.316.500	99.99
111	141.	Penyedia Bahan Pakai Habis Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	12.685.100	12.685.100	100.00
111	142.	Penyediaan Bahan Pakai Habis Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	18.726.100	18.726.100	100.00
111	143.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	390.606.400	388.375.300	99.43
111	144.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	102.820.000	92.833.680	90.29
111	145.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	456.957.862	437.813.157	95.81
111	146.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	379.694.704	327.818.762	86.34

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	147.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	212.033.000	202.476.000	95.49
111	148.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	308.430.500	244.507.450	79.27
111	149.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	102.000.000	62.940.000	61.71
111	150.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	359.477.500	359.321.545	99.96
111	151.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	621.549.200	582.262.800	93.68
111	152.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	360.919.465	208.325.415	57.72
111	153.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	355.000.000	349.146.000	98.35
111	154.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	512.718.119	430.558.800	83.98
111	155.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	176.517.600	166.915.500	94.56
111	156.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	290.686.000	286.437.185	98.54
111	157.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	297.350.000	222.500.000	74.83
111	158.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	265.581.500	264.649.060	99.65
111	159.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	378.035.000	372.183.300	98.45
111	160.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	148.383.000	129.787.400	87.47
111	161.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	14.750.000	2.750.000	18.64
111	162.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	336.529.500	336.428.700	99.97

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	163.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	363.299.000	346.470.000	95.37
111	164.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	302.700.000	269.624.400	89.07
111	165.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	60.000.000	59.000.000	98.33
111	166.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	307.740.500	306.039.000	99.45
111	167.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	138.366.000	137.217.350	99.17
111	168.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	198.626.300	193.846.220	97.59
111	169.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	111.500.000	109.000.000	97.76
111	170.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	269.179.520	268.668.520	99.81
111	171.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	312.658.299	310.709.939	99.38
111	172.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	172.695.970	147.790.790	85.58
111	173.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	624.823.197	622.680.925	99.66
111	174.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	190.133.424	190.075.225	99.97
111	175.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	441.566.000	438.087.550	99.21
111	176.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	343.978.533	332.191.211	96.57
111	177.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	152.000.000	152.000.000	100.00
111	178.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	331.066.960	327.251.350	98.85

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	179.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	249.355.085	239.142.675	95.90
111	180.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	321.797.900	321.287.636	99.84
111	181.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	175.000.000	130.320.000	74.47
111	182.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	250.632.476	242.175.850	96.63
111	183.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	363.451.309	357.612.224	98.39
111	184.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	338.869.753	333.675.574	98.47
111	185.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1.277.180.000	1.155.345.833	90.46
111	186.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	318.921.542	312.027.180	97.84
111	187.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	217.314.900	209.467.295	96.39
111	188.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	390.821.300	380.225.695	97.29
111	189.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	93.800.000	88.800.000	94.67
111	190.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	337.593.000	332.790.900	98.58
111	191.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	417.143.500	396.903.600	95.15
111	192.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	238.392.596	183.070.222	76.79
111	193.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	103.500.000	102.567.800	99.10
111	194.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	255.493.000	247.524.500	96.88

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	195.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	373.576.067	354.196.565	94.81
111	196.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	260.611.120	224.499.149	86.14
111	197.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	159.000.000	155.665.000	97.90
111	198.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	282.259.500	262.481.293	92.99
111	199.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	184.518.454	182.884.943	99.11
111	200.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	156.072.800	148.023.500	94.84
111	201.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	121.500.000	117.571.000	96.77
111	202.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	408.244.080	407.965.808	99.93
111	203.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	140.841.086	137.697.640	97.77
111	204.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	114.872.500	111.915.980	97.43
111	205.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	14.000.000	13.915.000	99.39
111	206.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	238.962.162	236.523.130	98.98
111	207.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	259.107.546	252.067.001	97.28
111	208.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	317.575.650	295.947.580	93.19
111	209.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	22.500.000	21.187.500	94.17
111	210.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	304.900.700	285.074.150	93.50
111	211.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haureulis	344.866.600	306.527.800	88.88

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	212.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	310.090.000	247.053.400	79.67
111	213.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	80.000.000	77.780.000	97.23
111	214.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	296.176.500	266.069.083	89.83
111	215.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	434.303.987	268.914.073	61.92
111	216.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	245.733.800	218.007.600	88.72
111	217.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	81.250.000	80.931.000	99.61
111	218.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	282.919.762	266.549.537	94.21
111	219.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	427.325.300	357.399.000	83.64
111	220.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	171.706.657	148.466.617	86.47
111	221.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	235.591.000	224.885.500	95.46
111	222.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	346.674.682	341.363.568	98.47
111	223.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	464.444.797	413.530.025	89.04
111	224.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	764.051.800	760.777.000	99.57
111	225.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	80.245.500	77.832.052	96.99
111	226.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	388.389.000	378.296.900	97.40
111	227.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	325.087.062	290.988.277	89.51

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	228.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	310.200.000	287.462.500	92.67
111	229.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	98.440.000	98.365.100	99.92
111	230.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	376.063.235	375.895.364	99.96
111	231.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	240.405.678	237.193.695	98.66
111	232.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	171.395.000	171.196.000	99.88
111	233.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	102.334.600	101.787.173	99.47
111	234.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	381.652.075	319.596.633	83.74
111	235.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	193.779.954	191.285.606	98.71
111	236.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	27.400.000	16.469.000	60.11
111	237.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	152.479.000	136.886.000	89.77
111	238.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	304.716.200	302.226.000	99.18
111	239.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	183.700.000	182.352.500	99.27
111	240.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	19.500.000	19.491.000	99.95
111	241.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	220.807.197	220.443.799	99.84
111	242.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	334.214.000	311.909.275	93.33
111	243.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	348.724.800	328.882.700	94.31
111	244.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	16.000.000	15.978.800	99.87

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	245.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	225.630.000	223.462.000	99.04
111	246.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	261.503.388	250.034.550	95.61
111	247.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	185.053.868	182.617.998	98.68
111	248.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	23.400.000	21.140.000	90.34
111	249.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	202.634.000	199.641.500	98.52
111	250.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	335.970.000	287.975.122	85.71
111	251.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	98.970.000	98.437.327	99.46
111	252.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	17.000.000	17.000.000	100.00
111	253.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	281.708.500	265.878.650	94.38
111	254.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	403.671.500	400.540.250	99.22
111	255.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	141.187.290	126.272.305	89.44
111	256.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	19.000.000	12.450.000	65.53
111	257.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	318.135.000	309.584.000	97.31
111	258.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	367.315.000	359.978.000	98.00
111	259.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	165.950.966	158.201.757	95.33
111	260.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	44.200.000	44.200.000	100.00
111	261.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	374.833.500	373.429.500	99.63
111	262.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	88.548.876	80.540.600	90.96

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
111	263.	Kegiatan Penyediaan Langanan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	176.250.000	154.856.944	87.86
111	264.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	88.000.000	87.483.000	99.41
111	265.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	218.915.473	213.123.500	97.35
111	266.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	484.953.900	346.503.047	71.45
111	267.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	155.175.000	128.121.680	82.57
111	268.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	30.400.000	30.100.000	99.01
111	269.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	383.636.522	377.262.400	98.34
111	270.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	313.002.500	285.183.250	91.11
111	271.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	168.322.250	164.665.700	97.83
111	272.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	8.240.000	5.550.000	67.35
111	273.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	114.875.000	114.526.350	99.70
111	274.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	226.496.000	205.727.100	90.83
111	275.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	161.621.980	144.697.020	89.53
111	276.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi, Dan Dokumentasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	25.616.000	15.415.000	60.18
111	277.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	208.186.786	205.288.559	98.61
111	278.	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	242.968.000	237.569.100	97.78
111	279.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dan Tenaga Teknis Non Pegawai Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	922.958.573	848.186.901	91.90
111	280.	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal Dan Luar Kantor Di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	724.469.329	632.328.072	87.28

PRO GRA M	KEGIA TAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Jumlah Belanja Langsung	363.004.227.336	341.129.121.645	93.97
		Jumlah Belanja Tidak Langsung	392.346.514.489	389.676.143.971	99.32
		Total Belanja	755.350.741.825	730.805.265.616	96.75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 4 dan 5.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Than 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana visi, menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dan akuntabel dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Kriteria Pencapaian Kinerja
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah	%	16.13	8.75	15.36	16,23	5,8	CC
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	82.029	86.54	84.40	78,67	75,35	AA
3	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	-	-	100.03	104,56	106,95	A
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	9.218.671	14.736.803	16,085,121	17,3juta	18,7juta	AA
	b. Pajak Air Permukaan	wp	685	685	785	785	877	AA
	c. Pajak Bahan Bakar	Rupiah	2.119 T	21	24	30	30	AA
4	Jumlah Wajib Retribusi	wr	145	165	159	147	169	AA
5	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Jenis Objek Penerimaan	42	33	36	42	40	AA
6	Persentase Potensi wajib pajak yang terpungut	%	103.33	102.39	86,51	86,07	75,29	AA
7	Persentase Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	113.73	124.32	124.21	100,49	110,45	AA
8	Persentase Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	128,72	145,67	104,93	120	135,11	AA
9	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,40	82,11	82,69	82,3	84,4	AA
10	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan \wp	1:284	1:233	1:192	1 : 246	1:156	AA
11	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	96,38	96,23	100	100	100	AA
12	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	80	85	90	100	100	AA
13	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	0,99	0,127	1,37	0,01	0,06	AA
14	Persentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,09	1,62	0,01	0.0275	0,01	AA
15	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	kali	133,3	127,27	95,25	95,25	97,52	AA
16	Persentase Defisiensi pelaksanaan SOP dan SP	%	5,67	6	0	0	4,44	AA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Kriteria Pencapaian Kinerja
			2014	2015	2016	2017	2018	
17	Persentase Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	99,68	99,85	99,90	100	99,62	AA
18	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	99,68	99,85	350	333	146	AA
19	Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	94,44	100	100	n/a	n/a	AA
20	Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	point	77,63	70,46	81,96	81,99	83,18	AA
21	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% % %	39,54 18,16	38,83 16,36	39,00 21,00	40,44 21,69	42,45 22,05	AA
22	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	36,32	81,41	126,68	242,42	299,09	AA
23	Persentase aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	9,1	9,85	17,82	31,70	46,46	AA

Keterangan :

- PK : Pencapaian Kinerja
- Dilakukan Revisi Renstra pada Tahun 2015, 2016 dan 2018.

Implementasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2019 mencakup 9 sasaran dengan 23 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2018 dapat diuktisarkan sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan Analisis Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2013 – 2018, dalam pelaksanaannya memiliki 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 dan 2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2018
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah antar tahun anggaran	%	10	5,80	162,30	58,00	CC

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2018
			Target (%)	Realisasi (%)			
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss)	%	86	75,35	93,66	87,62	A

Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2017 – 2018

URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2017			TAHUN 2018			Kenaikan /Penurunan
		TARGET 2017	REALISASI	%	TARGET 2017	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH		31.371.635.157.505	32.189.552.633.142	102.61%	33.264.593.878.621	34.057.159.194.316	102.38%	5,48%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		17.121.067.343.303	18.106.718.727.362	105.76%	18.817.250.109.020	19.781.111.500.405	105.12%	8,46%
PAJAK DAERAH		15.626.632.282.000	16.483.079.173.742	105.48%	17.381.809.897.000	18.153.723.914.593	104.44%	9,20%
1 PKB		6.140.280.000.000	6.534.038.308.392	106.41%	7.180.342.000.000	7.540.876.099.245	105.02%	13,35%
2 BBNKB		4.814.126.000.000	5.092.551.608.700	105.78%	5.352.889.000.000	5.527.989.187.700	103.27%	7,88%
3 PBBKB		2.191.395.488.000	2.314.028.808.428	105.60%	2.356.184.651.000	2.512.911.700.663	106.65%	7,91%
4 PAJAK AIR		60.000.000.000	59.247.318.669	98.75%	42.624.011.000	52.861.602.273	124.02%	-12,08%
5 PAJAK ROKOK		2.420.830.796.000	2.483.213.129.553	102.58%	2.449.770.235.000	2.519.085.324.712	102.83%	1,42%
RETRIBUSI DAERAH		60.017.945.501	60.274.561.454	100.43%	45.267.605.170	52.451.573.702	115.87%	-14,91%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		359.866.552.681	345.121.410.237	95.90%	349.779.545.863	348.537.989.633	99.65%	0,98%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		1.074.550.561.121	1.218.243.581.929	113.37%	1.040.393.060.987	1.226.398.022.477	117.88%	0,66%
DANA PERIMBANGAN		14.109.678.354.202	13.981.445.314.589	99.09%	14.379.237.589.601	14.207.941.513.901	98.81%	1,59%
1 Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak		1.811.537.784.202	1.851.522.979.677	102.21%	1.609.724.433.601	1.804.540.601.861	112.10%	-2,60%
2 Dana Alokasi Umum		3.011.001.477.000	3.011.001.477.000	100.00%	3.023.552.986.000	3.023.552.986.000	100.00%	0,42%
2 Dana Alokasi Khusus		9.287.139.093.000	9.118.920.857.912	98.19%	9.745.960.170.000	9.379.847.926.040	96.24%	2,78%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		140.889.460.000	101.388.591.191	71.96%	68.106.180.000	68.106.180.010	100.00%	-48,87%

Tabel 3.3.1.1 Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2016 – 2017

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 32.189.552.633.142,00 sedangkan tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 34.057.159.194.316,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.867.606.561.174,00 atau sebesar 5,48% terhadap tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% sehingga capaian kinerjanya yaitu sebesar $5,48/10 \times 100 = 54,80\%$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

Ketidaktercapaian target renstra pendapatan daerah sebesar 10% disebabkan oleh terdapat beberapa komponen pendapatan mengalami penurunan dan kalaupun ada komponen yang naik, kenaikannya tidak signifikan.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &: = \frac{\text{Pendapatan Daerah 2018} - \text{Pendapatan Daerah 2017}}{\text{Pendapatan Daerah 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{34.057.159.194.316 - 32.189.552.633.142,00}{32.189.552.633.142,00} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \quad 5,80\%$$

Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss) yaitu Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 34.057.159.194.316,00 dikurangi Dana Boss Tahun 2018 sebesar Rp. 7.806.277.164.600,00 menjadi sebesar Rp, 26.250.882.029.716,00 sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 yaitu Rp, 19.781.111.500.405,00 dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS/DAK) dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah 2018}}{\sum \text{Pendapatan Daerah 2018} - \sum \text{Dana Boss 2018}} \times 100\% \\ &= \frac{19.781.111.500.405,00}{34.057.159.194.316,00 - 7.806.277.164.600,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{75,35\%} \end{aligned}$$

Jumlah Realisasi Dana Boss Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 7.637.799.197.500,00 sehingga capaian Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana Boss), sebesar 73.75% dari target sebesar 84%. Hal tersebut terjadi karena adanya pegeseran proporsi anggaran dalam struktur pendapatan daerah, berdasarkan tingkat pertumbuhan antara PAD dan DAK pada periode tahun 2017-2018 dapat dilihat tingkat pertumbuhan PAD sebesar 9.25% sementara tingkat pertumbuhan DAK sebesar 1,62% seiring dengan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi yang berdampak pada meningkatnya dana alokasi khusus untuk sektor pendidikan, baik untuk biaya operasional sekolah, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, sehingga mempengaruhi capaian kinerja tahun 2018 yang hanya mencapai 75.35% kategori Sangat Baik (BB)

Tabel 3.3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Terdatanya Potensi Pajak dan Bukan Pajak Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	100	104,56	104,56	106,95
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	18.4juta	18.7juta	98.30	102
	b. Pajak Air Permukaan	wp	785	877	100	111,72
	c. Pajak Bahan Bakar	Wapu	28	30	115,38	107,14
2	Jumlah Wajib Retribusi	wr	170	169	133,06	99,41
3	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah)	objek	35	40	114,29	102,86

Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2018 terdiri dari :

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	POTENSI AWAL 2018	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		POTENSI AKHIR 2018	KTMDU 2018	%	POTENSI RIIL AKHIR 2018	KTMDU RIIL AKHIR 2018	%
			BARU	MUT MASUK	MUT KELUAR	KEDALUARSA						
1	SEDAN, JEEP, MINIBUS, Dsj: - PRIBADI - UMUM - PEMERINTAH/TNI/POLRI	1.840.880	166.978	41.397	57.249	43.194	1.948.812	370.290	19,00	1.992.006	413.484	20,76
		83.745	944	69	1.021	5.303	78.434	36.159	46,10	83.737	41.462	49,51
		20.480	952	19	40	1.055	20.356	4.937	24,25	21.411	5.992	27,99
2	BUS, MICROBUS, Dsj: - PRIBADI - UMUM - PEMERINTAH/TNI/POLRI	8.561	732	136	401	620	8.408	2.314	27,52	9.028	2.934	32,50
		20.764	1.127	206	554	1.516	20.027	5.824	29,08	21.543	7.340	34,07
		1.416	94	5	3	69	1.443	362	25,09	1.512	431	28,51
3	TRUCK, LIGHT TRUCK, PICKUP, Dsj: - PRIBADI - UMUM - PEMERINTAH/TNI/POLRI	496.919	31.388	4.546	8.344	31.689	492.820	139.793	28,37	524.509	171.482	32,69
		59.361	6.079	920	992	2.654	62.714	13.985	22,30	65.368	16.639	25,45
		6.876	412	13	7	520	6.774	2.151	31,75	7.294	2.671	36,62
4	KENDARAAN ALAT BERAT DAN BESAR, Dsj: - PRIBADI - UMUM - PEMERINTAH/TNI/POLRI	49	-	3	1	9	42	8	19,05	51	17	33,33
		10	-	-	-	1	9	3	33,33	10	4	40,00
		4	-	-	-	-	4	1	25,00	4	1	25,00
5	SEPEDA MOTOR (RODA 2 DAN 3), Dsj: - PRIBADI - UMUM - PEMERINTAH/TNI/POLRI	14.730.396	1.177.709	34.716	56.896	1.828.164	14.057.761	5.721.556	40,70	15.885.925	7.549.720	47,52
		137	68	-	-	-	205	65	31,71	205	65	31,71
		76.967	2.128	53	20	10.794	68.334	26.206	38,35	79.128	37.000	46,76
	JUMLAH (1 S.D 5):	17.346.565	1.388.611	82.083	125.528	1.925.588	16.766.143	6.323.654	37,72	18.691.731	8.249.242	44,13

Tabel 3.3.2.1 Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Sumber : Pendapatan I

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH	
		FUNGSI				
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	PKB					
	Sedan, Jeep, Station Wagon	1.992.006	21.411	83.737	2.097.154	
	Bus, Mikro Bus	9.028	1.512	21.543	32.083	
	Truck, Pick Up	524.509	7.294	65.368	597.171	
	Alat Berat	51	4	10	65	
	Sepeda Motor, Scooter	15.885.925	79.128	205	15.965.258	
	Jumlah Potensi PKB	17.076.805	105.743	164.017	18.691.731	

Tabel 3.3.2.2 Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Sumber : Pendapatan I (data diolah)

Potensi Pajak Air Permukaan 2018

NO.	NAMA PPPD	AKTIF	PASIF	JUMLAH	KETERANGAN
1	KOTA DEPOK 1	2	0	2	
2	KOTA DEPOK II (CINERE)	5	0	5	
3	KAB. BOGOR (CIBINONG)	50	15	65	
4	KOTA BOGOR	7	2	9	
5	KOTA SUKABUMI	8	0	8	
6	KAB. SUKABUMI I (CIBADAK)	46	23	69	
7	KAB. SUKABUMI II (PLB.RATU)	22	16	38	
8	KAB. CIANUR	12	8	20	
9	KOTA BEKASI	9	7	16	
10	KAB. BEKASI (CIKARANG)	42	5	47	
11	KAB. KARAWANG	34	8	42	
12	KAB. PURWAKARTA	23	3	26	
13	KAB. SUBANG	10	12	22	
14	KOTA CIREBON	0	0	0	TIDAK ADA WP
15	KAB. CIREBON I (SUMBER)	5	1	6	
16	KAB. CIREBON II (CILEDUG)	3	1	4	
17	KAB. INDRAMAYU 1	11	6	17	
18	KAB. INDRAMAYU II (HAURGEULIS)	0	0	0	TIDAK ADA WP
19	KAB. KUNINGAN	3	0	3	
20	KAB. MAJALENGKA	3	3	6	
21	KOTA BANDUNG I (PAJAJARAN)	6	0	6	

NO.	NAMA PPPD	AKTIF	PASIF	JUMLAH	KETERANGAN
22	KOTA BANDUNG II (KAWALUYAAN)	12	1	13	
23	KOTA BANDUNG III (SOETA)	8	0	8	
24	KAB. BANDUNG BARAT (PADALARANG)	30	19	49	
25	KAB. BANDUNG 1 (RANCAEKEK)	67	20	87	
26	KAB. BANDUNG II (SOREANG)	29	18	47	
27	KAB. SUMEDANG	21	8	29	
28	KAB. GARUT	30	1	31	
29	KOTA TASIKMALAYA	3	15	18	
30	KAB. TASIKMALAYA	18	46	64	
31	KAB. CIAMIS	23	45	68	
32	KAB. PANGANDARAN	4	0	4	
33	KOTA CIMAHI	30	4	34	
34	KOTA BANJAR	4	10	14	
	JUMLAH	580	297	877	

Tabel 3.3.2.3 Potensi Pajak Air Permukaan Tahun 2018

Sumber : Pendapatan I (data diolah)

Potensi Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2018

No.	NAMA WAJIB PUNGUT PBBKB
1.	PT. AKR CORPORINDO Tbk
2.	PT. SHELL INDONESIA
3.	PT. BARIA BULK TERMINAL
4.	PT. PERTAMINA PATRANIAGA
5.	PT. SOLAR PREMIUM CENTRAL
6.	PT. APEX INDOPACIFIC
7.	PT. JASATAMA PETROINDO
8.	PT. INTI LINGGA SEJAHTERA
9.	PT. PERTAMINA (PERSERO)
10.	PT. TOTAL OIL INDONESIA
11.	PT. ELNUSA PETROFIN
12.	PT. PETRO ENERGY
13.	PT. PUTRA PERSADA PERMATA PRIMA PERKASA
14.	PT. PRO ENERGI
15.	PT. PETROLIN NIAGA ENERGI
16.	PT. PATRA BUANA PUTRA
17.	PT. ELMINDO CIPTA PERSADA

No.	NAMA WAJIB PUNGUT PBBKB
18.	PT. PUNINAR MITRA ABADI
19.	PT. TELEINDO PRAKARSA
20.	PT. BEST OIL RESOURCES
21.	PT. ABETA CAHAYA GEMILANG
22.	PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
23.	PT. BAYU SINERGI
24.	PT. NIAGA BUMI ENERGI
25.	PT. KUTILANG PAKSI MAS
26.	PT. SAMUDERA ETAM ENERGI
27.	PT. EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA
28.	PT. SUMA ADI JAYA
29.	PT. MASINTON ABADI SENTOSA
30.	PT. SUMATERA PETRO NIAGA

Tabel 3.3.2.3 Potensi Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Tahun 2018

Sumber : Pendapatan II

Berdasarkan data diatas didapatkan rata pencapaian Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan adalah sebesar :

$$= \frac{102 + 111,72 + 107,14}{3} \times 100\% \\ = 106,95\%$$

sehingga capaiannya adalah 106,95% dengan kategori **Sangat Memuaskan (AA)**

Potensi Wajib Retribusi untuk Tahun 2018 terealisasi sebanyak 169 WR dari target sebanyak 170 WR sehingga capaian kinerjanya adalah $169/170 \times 100\% = 99,41\%$, Penurunan ini disebabkan Koperasi Keluarga Besar Dinas Pendapatan tidak merealisasikan pungutan retribusi, karena tanah tempat berdirinya bangunan Koperasi dibangun Mesjid Al Akhyar, sehingga untuk sementara pungutan terhadap lahan yang digunakan koperasi dihentikan.

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD Bidang Pendapatan II & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah) dari target sebanyak 35 jenis penerimaan dapat terealisasi sebanyak 40 jenis objek penerimaan sehingga capaiannya adalah :

$$\frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 114,29\%$$

kategori **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3.3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Efektifnya Pemungutan Seluruh Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75	75,29	114,76	100,38
2	Persentase Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	90	110,45	111,65	122,72
3	Persentase Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	%	100	135,11	120,00	135,11

Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut yang terdiri dari dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	POTENSI			REALISASI	Capaian Efektifitas Pemungutan	
		FUNGSI		JUMLAH			
		PRIBADI	DINAS	JUMLAH			
1	PKB						
	SEDAN, JEEP, STATION WAGON	1.992.006	21.411	83.737	2.097.154	1.760.183	
	BUS, MIKRO BUS	9.028	1.512	21.543	32.083	23.402	
	TRUCK, PICK UP	524.509	7.294	65.368	597.171	440.581	
	ALAT BERAT	51	4	10	65	45	
	SEPEDA MOTOR, SCOOTER	15.885.925	79.128	205	15.965.258	8.940.329	
	JUMLAH PKB	18.411.519	109.349	170.863	18.691.731	11.164.540	
2	APER	877			580	66.13	
3	PAJAK BAHAN BAKAR KB	30			30	100.00	
		RATA - RATA CAPAIAN = (58.21 + 100 + 95,83) / 3				75.29	

Tabel 3.3.3.1 Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Persentase potensi wajib pajak yang terpungut dari target 75% dapat terealisasi sebesar 75,29% dengan demikian maka capaian kinerjanya adalah

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{75,29}{75} \times 100\% = 100,38\%$$

Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Persentase potensi wajib retribusi yang terpungut dari target 90% dari potensi yang ada (170 WR) yaitu sebesar 153 WR dapat terealisasi sebesar 169 WR sehingga realisasinya sebesar $169/153 \times 100\% = 110,45\%$, dengan demikian maka capaian kinerjanya adalah :

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{110,45}{90} \times 100\% = 122,72\%$$

Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Persentase objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah,

Penerimaan	Target	Realisasi	%
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	349.779.545.863,00	348.537.989.633,00	99,65
Lain – Lain PAD yang Sah	1.040.393.060.987,00	1.529.793.692.992,00	147,04
Jumlah	1.390.172.606.850,00	1.878.331.682.625,00	135,11

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah dari target pencapaian sebesar 100 dapat terealisasi sebesar 135,11% dengan demikian capaian kinerjanya adalah :

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{135,11}{100} \times 100\% = 135,11\%$$

Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Penurunan capaian realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan disebabkan PT. Jaswita tidak melakukan penyetoran dividen dari target dividen tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.700.000.000,- hanya Rp.2.000.000.000,- (54,05%), sementara dividen tahun buku 2016 senilai Rp.3.096.374.070,- sama sekali belum disetor. Demikian juga dengan kewajiban dividen tahun buku 2015 PT. Jasa Sarana, sebesar Rp. 13.131.485.325 belum disetorkan.

Tabel 3.3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,8	84,04	101,99	101,50

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 ada peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 1,74 point Bapenda Provinsi Jawa Barat terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik peningkatan sarana prasarana pendukung, pengembangan jenis layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak, serta pengembangan infrastruktur strategis yang berkelanjutan sehingga untuk kenyamanan dan peningkatan pelayanan lebih representatif. Pengukuran IKM dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun) dengan menetapkan jumlah responden untuk setiap Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat sebanyak 400 orang (lebih banyak dari tahun sebelumnya)

Capaian Kinerja IKM adalah

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{84,4}{82,8} \times 100\% = 101,50\%$$

Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Tabel 3.3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik Yang Menopang Pengelolaan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	Sentra Layanan/ Jumlah Wajib Pajak	1 : 200	1 : 156	118	122%
3	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	95	100	111,12	105,26
4	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	100	100	100	100

Lokasi pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor se-Jawa Barat terdiri dari :

No,	Lokasi Pelayanan	\sum Titik Pelayanan	\sum Hari Kerja dalam setahun
1.	<i>Samsat Induk</i>	34	292 hari
2.	<i>Samsat Outlet</i>	20	344 hari
3.	<i>Samsat KCP</i>	30	340 hari
4.	<i>Samsat Drive Thru</i>	2	292 hari
5.	<i>Samsat Keliling</i>	48	240 hari
6.	<i>Samsat Gendong</i>	68	240 hari
7.	<i>E-Samsat (backhaul)</i>	1	365 hari
	Jumlah Titik Layanan	203	
	Rata-rata pelayanan/tahun		352 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2018 yaitu sebanyak 11.164.540 kbm yang dilayani oleh 203 lokasi sentra pelayanan selama rata-rata 352 hari dalam setahun sehingga Persentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah

terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Realisasi kbm tahun 2018}}{\sum \text{sentra layanan}} \\
 &= \frac{\sum 11.164.540 \text{ kbm}}{\sum 203 \text{ sentra layanan}} = 54.997,34 \text{ kbm/tahun} \\
 &= \frac{54.997,34}{352 \text{ hari}} = 156/\text{hari}
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun Anggaran 2018 adalah 1 sentra pelayanan dapat melayani 156 wajib pajak/hari sedangkan targetnya adalah 200 sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{(2 \times 200) - 156}{200} \times 100\% \\
 &= \frac{244}{200} \times 100\% \\
 &= 122\%
 \end{aligned}$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Ketersediaan SOP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	SK SOP	Jumlah SOP
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/288 — Dispenda/2014	152
2.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/526 — Dispenda/2016 Tanggal 21 November 2016	52
3.	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/264-Bapenda, Tanggal 21 Agustus 2018	180
	Jumlah	180



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880
Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 061/264 -Bapenda

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja unit organisasi melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperlukan sistem dan prosedur kerja sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :
1. Keputusan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/288-Dispenda/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 2014;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/526-Dispenda/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 21 November 2016.

- KEDUA : Nama Standar Operasional Prosedur dari setiap bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur , yang terdiri dari :
- a. SOP 1 tentang deskripsi unit organisasi;
 - b. SOP 2 tentang informasi mengenai prosedur yang distandardkan;
 - c. SOP 3 tentang prosedur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Agustus 2018

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



H. DADANG SUHARTO, SH, MM
Pembina Utama
NIP. 19580823 198603 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 061/264 -Bapenda
 TANGGAL : 21 Agustus 2018
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR (SOP) PADA
 BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT, UPTD PUSAT
 PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 WILAYAH
 KABUPATEN/KOTA DI
 PROVINSI JAWA BARAT
 DAN PUSAT LAYANAN
 OPERASIONAL
 PENDAPATAN DAERAH

NO	Unit Kerja	Kegiatan	Nomor
1	2	3	4
A.	Sekretariat		
	1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Pengelola barang milik negara/daerah (perencanaan kebutuhan); 2. Pengelola barang milik negara/daerah (penatausahaan barang); 3. Pengelola barang milik negara/daerah (Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian); 4. Pengelola barang milik negara/daerah (penggunaan barang milik daerah); 5. Pengelola barang milik negara/daerah (pemanfaatan barang); 6. Pengelola barang milik daerah(pembinaan, pengawasan dan pengendalian); 7. Pengelola barang milik negara/daerah (Pengadaan barang dan jasa); 8. Juru informasi dan komunikasi; 9. Pengelola barang milik negara/daerah (Pengamanan dan pemeliharaan barang); 10. Pengelola barang milik negara/daerah hibah/penarikan) ;	80.01.2018 80.02.2018 80.03.2018 80.04.2018 80.05.2018 80.06.2018 80.07.2018 80.08.2018 80.09.2018 80.10.2018

		11. Alih media arsip (e-arsip) di P3D wilayah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat;	80.11.2018
		12. Pengelola barang milik negara/daerah (Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (R4));	80.12.2018
		13. Pengelola barang milik negara/daerah (barang-barang inventarisasi umum);	80.13.2018
		14. Penanganan arsip inaktif;	80.14.2018
		15. Penyusutan arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun;	80.15.2018
		16. Penyusunan dan pengumuman daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP);	80.16.2018
		17. Pelayanan permohonan informasi publik;	80.17.2018
		18. Uji konsekuensi informasi publik;	80.18.2018
		19. Penanganan keberatan informasi publik;	80.19.2018
		20. Fasilitasi sengketa informasi;	80.20.2018
		21. E-purchasing produk barang/jasa dengan negosiasi harga;	80.21.2018
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset		1. Pengajuan Proses Spp Ls;	80.22.2018
		2. Pengajuan Proses Spp Ganti Uang (Gu);	80.23.2018
		3. Pengajuan Proses Spp Tambah Uang (Tu) Persediaan;	80.24.2018
		4. Pengajuan Proses Spp Uang Persediaan (Up);	80.25.2018
		5. Pengusulan Dan Pendistribusian Tunjangan Kompensasi Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;	80.26.2018
		6. Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran Bendahara Pengeluaran;	80.27.2018
		7. Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan;	80.28.2018
		8. Rekonsiliasi Pajak Daerah;	80.29.2018
		9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	80.30.2018

	3) Sub Kepegawaian	Bagian	1. Penyusunan pemberian surat ijin perceraian PNSD 2. Penyusunan pembuatan kartu istri dan kartu suami PNSD 3. Pembuatan kartu pegawai PNSD 4. Penyusunan kenaikan gaji berkala PNSD 5. Penyusunan kenaikan pangkat PNSD 6. Penyusunan pemberian hukuman disiplin PNSD 7. Penyusunan pemberian SK penghargaan PNSD 8. Penyusunan SK pensiun PNSD 9. Pembuatan kartu Taspen PNSD 10. Pembuatan DIKLATPIM 11. Usulan rekap pegawai bulanan 12. Simpanan Kepegawain BKD 13. Surat Tugas 14. Absensi Pegawai 15. Arsip Pegawai Negeri Sipil 16. Pengusulan Cuti Pegawai Negeri Sipil 17. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 18. Pegawai Negeri Sipil Meninggal Dunia 19. Usulan PKL 20. Pengusulan Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Bulanan 21. Pengusulan Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Tahunan	80.31.2018 80.32.2018 80.33.2018 80.34.2018 80.35.2018 80.36.2018 80.37.2018 80.38.2018 80.39.2018 80.40.2018 80.41.2018 80.42.2018 80.43.2018 80.44.2018 80.45.2018 80.46.2018 80.47.2018 80.48.2018 80.49.2018 80.50.2018 80.51.2018
B.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan			
	Sub Perencanaan Belanja	Bidang Kinerja	1. Penyusunan Rencana Kinerja Utama (IKU). 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). 3. Penyusunan Rencana kerja (Renja). 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).	80.52.2018 80.53.2018 80.54.2018 80.55.2018 80.56.2018 80.57.2018

	Sub Bidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan	1. Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah; 2. Penghitungan Bahan Data Bagi Hasil Pajak Daerah; 3. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Bea Balik Namakendaraan Bermotor (BBNKB); 4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Air Permukaan (APER); 5. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 6. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB); 7. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Rokok; 8. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 9. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Rokok; 10. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Air Permukaan;	80.58.2018 80.59.2018 80.60.2018 80.61.2018 80.62.2018 80.63.2018 80.64.2018 80.65.2018 80.66.2018 80.67.2018
	Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama	1. Penyusunan Perjanjian Kerjasama; 2. Usulan Rancangan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Dan Intruksi Gubernur (INGUB); 3. Usulan Perubahan Kelembagaan 4. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA); 5. Usulan Rancangan Peraturan Gubernur (PERGUB). 6. Usulan Rancangan TUPOKSI 7. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama; 8. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kerjasama;	80.68.2018 80.69.2018 80.70.2018 80.71.2018 80.72.2018 80.73.2018 80.74.2018 80.75.2018

C.	Bidang Pendapatan I		
	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	1. Pendataan Potensi Subjek Dan Objek Pajak; 2. Perhitungan Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).	80.76.2018 80.77.2018
	Sub Bidang Layanan dan Keberatan	1. Pengusulan Kebijakan Teknis Pendapatan I; 2. Penanganan Keringanan Pajak; 3. Penanganan Keberatan Pajak.	80.78.2018 80.79.2018 80.80.2018
	Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan	1. Penyusunan Bahan Laporan Potensi KTMDU; 2. Pengumpulan Bahan Pelaporan Subjek Dan Objek Pajak.	80.81.2018 80.82.2018
D.	Bidang Pendapatan II		
	Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I	1. Rekonsiliasi Penerimaan PBBKB; 2. Mekanisme Sewa Menyewa Barang Milik Daerah (BMD) Tanah Dan Bangunan Untuk Penempatan Mesin Atm Dan Kantor Kas; 3. Realisasi Penerimaan PBBKB Dan Bagi Hasil; 4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5. Penetapan Estimasi Target PBBKB	80.83.2018 80.84.2018 80.85.2018 80.86.2018 80.87.2018
	Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II	1. Penyelesaian Tunggakan /Piutang Retribusi Daerah. 2. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pendapatan Retribusi Daerah. 3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan PD Penghasil. 4. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Bidang Pendapatan II. 5. Pelaksanaan Identifikasi Potensi Retribusi Daerah.	80.88.2018 80.89.2018 80.90.2018 80.91.2018 80.92.2018
	Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan III	1. Penghitungan target dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (dana transfer);	80.93.2018

		2. Penghitungan realisasi bagi hasil pajak rokok; 3. Penghitungan target pajak rokok.	80.94.2018 80.95.2018
E.	Bidang Pembinaan Dan Pengendalian		
	Sub Bidang Pembinaan dan Kepatuhan	1. Penyusun Investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	80.96.2018
		2. Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Aspek Tupoksi;	80.97.2018
		3. Memfasilitasi Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	80.98.2018
	Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian	1. Pelaksanaan Teknis Terhadap Kegiatan Sekretariat, Bidang-Bidang, P3D dan PLOPD	80.99.2018
		2. Pemutahiran	80.100.2018
		3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor/Mess P3D;	80.101.2018
		4. Pemeriksaan Khusus (Riksus);	80.102.2018
		5. Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Audit Internal Dan Eksternal.	80.103.2018
	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1. Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Dalam Capaian Pendapatan Daerah;	80.104.2018
		2. Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan Dalam Penyerapan Belanja Badan;	80.105.2018
		3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);	80.106.2018
		4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);	80.107.2018
		5. Laporan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);	80.108.2018
		6. Penyajian Data Dan Informasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.	80.109.2018
F.	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat		
	1) Subbagian Tata Usaha;	1. Penyusunan Program Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah. 2. Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 3. Kenaikan Pangkat PNS.	88.110.2018 88.111.2018 88.112.2018

	4. Daftar Urut Kepangkatan PNS. 5. Penyusunan (Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Bulanan. 6. Penyusunan (Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Tahunan. 7. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran. 8. Proses Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan LS/GU. 9. Pejabat Pengelola SIPKD Dalam Pengelolaan Belanja (GU). 10. Penerimaan, penyimpanan, penerimaan dan pelaporan barang. 11. Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Masuk. 12. Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Keluar. 13. Evaluasi Kinerja. 14. Koordinasi. 15. Penyusunan usulan cuti pegawai. 16. Penyusunan usulan SK Pensiu PNSD. 17. Pengamanan dan pemeliharaan barang. 18. Pengadministrasi Sarana Prasarana. 19. Penyusunan Usulan Pembuatan Kartu Istri dan Kartu Suami PNSD. 20. Pembuatan Usulan Kartu Pegawai PNSD. 21. Pemberian Surat Ijin Perceraian PNSD. 22. Absensi Pegawai Negeri Sipil. 23. Arsip Pegawai Negeri Sipil. 24. Pembuatan Usulan Kartu Taspen PNSD. 25. Pegawai Negeri Sipil Meninggal Dunia. 26. Usulan PKL. 27. Penyusunan pemberian hukuman disiplin PNSD	88.113.2018 88.114.2018 88.115.2018 88.116.2018 88.117.2018 88.118.2018 88.119.2018 88.120.2018 88.121.2018 88.122.2018 88.123.2018 88.124.2018 88.125.2018 88.126.2018 88.127.2018 88.128.2018 88.129.2018 88.130.2018 88.131.2018 88.132.2018 88.133.2018 88.134.2018 88.135.2018 88.136.2018
--	--	--

	2) Seksi Pendataan dan Penetapan;	1. Pelayanan Pengecekan Pajak Progresif. 2. Pendataan dan Penetapan PKB/BBNKB di Samsat Induk 3. Layanan Fiskal Antar Daerah (FAD)/Mutasi Keluar 4. Mutasi Masuk 5. Proses Penetapan KBM Angkutan Umum 6. Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 7. Penghapusan Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan/atau Bencana Alam 8. Proses Proteksi Kendaraan Yang Sudah Beralih Kepemilikan 9. Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 10. Pendataan dan Penetapan PKB/BBNKB Kendaraan Baru 11. Proses Buka Proteksi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor 12. Proses Buka Proteksi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Antar Daerah	88.137.2018 88.138.2018 88.139.2018 88.140.2018 88.141.2018 88.142.2018 88.143.2018 88.144.2018 88.145.2018 88.146.2018 88.147.2018 88.148.2018
	3) Seksi Penerimaan dan Penagihan;	1. Penerimaan RPKD. 2. Penerimaan dan Pembayaran PKB dan SWDKLJ di Samsat Induk 3. Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLJ Samsat Outlet, Samsat Keliling, Samades, Samdong dan Drive THRU 4. Penerimaan Pajak Air Permukaan. 5. Realisasi Penerimaan dan Penyetoran 6. Pengajuan Permohonan Penghapusan Piutang. 7. Penelusuran/Sensus Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang	88.149.2018 88.150.2018 88.151.2018 88.152.2018 88.153.2018 88.154.2018 88.155.2018

		<p>(KTMDU).</p> <p>8. Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Samades dan Samdong</p> <p>9. Keberatan Pajak Air Permukaan PKB/BBNKB, (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB).</p> <p>10. Piutang dan Penagihannya.</p> <p>11. Penghapusan KTMDU Dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan Bencana Alam.</p> <p>12. Petugas Penagihan PAP dan RPKD</p> <p>13. Pengelola Pelaporan Data Penerimaan dan Penagihan</p> <p>14. Penanganan Keringanan Pajak</p> <p>15. Penanganan Keberatan Pajak</p> <p>16. Penanganan Keluhan</p>	88.156.2018 88.157.2018 88.158.2018 88.159.2018 88.160.2018 88.161.2018 88.162.2018 88.163.2018 88.164.2018
G.	Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah		
	1) Sub Bagian Tata Usaha	<p>1. Evaluasi Kinerja;</p> <p>2. Program Kerja;</p> <p>3. Daftar Urut Kepangkatan;</p> <p>4. Kenaikan Gaji Berkala (Kgb), Kenaikan Pangkat;</p> <p>5. Tata Usaha Dp3;</p> <p>6. Pengelolaan Administrasi Umum Surat Keluar;</p> <p>7. Pelaporan Barang;</p> <p>8. Penerimaan Dan Penyimpanan Barang;</p> <p>9. Pengeluaran Barang;</p> <p>10. Pertanggungjawaban Keuangan.</p>	88.165.2018 88.166.2018 88.167.2018 88.168.2018 88.169.2018 88.170.2018 88.171.2018 88.172.2018 88.173.2018 88.174.2018
	2) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan	1. Penanganan Keluhan.	88.175.2018
	3) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan	<p>1. Penggantian Perangkat Infrastruktur TI;</p> <p>2. Pemeliharaan Infrastruktur TI;</p> <p>3. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Respon Lambat;</p> <p>4. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Layanan TI Tidak Bisa Digunakan;</p>	88.176.2018 88.177.2018 88.178.2018 88.179.2018
		5. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Data Error.	88.180.2018

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Pasal 2e ayat (6) Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka SOP-SOP yang sudah ditetapkan tahun-tahun sebelumnya dicabut dan diganti dengan SOP baru yang disusun tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/264-Bapenda, Tanggal 21 Agustus 2018.

Hasil Review SOP yang di tetapkan dengan Kepgub tahun 2018 terdapat beberapa SOP yg harus disesuaikan kembali dengan kondisi eksisting berdasarkan dengan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan struktur organisasi yang baru sehingga beberapa SOP, sehingga perlu disusun SOP baru, yang lebih aplikatif, efektif dan efisien baik di Pusat maupun di UPTD yang berakibat beberapa SOP dihilangkan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan harus di review dan kemungkinan jumlah SOP bisa bertambah dan Berkurang, dengan demikian maka capaian kinerja sasaran Indek Kepuasan Masyarakat adalah :

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 105,26\%$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Target ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tahun 2018 yaitu sebanyak 29 Standar Pelayanan atau (100%) dapat direalisasikan sebanyak 29 Standar Pelayanan dengan demikian Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tercapai sebesar 100% dengan kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3.3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1,2	0,06	199,28	195,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
2	Persentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,2	0.01	198.04	199,17

Laporan gangguan pelayanan titik pelayanan samsat Bulan Januari sd Desember 2018 diuraikan dalam table berikut ini :

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN JANUARI 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (menit)	KETERANGAN
08/01/2018 12:19	Samsat Outlet Luckysquare	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	86	
11/01/2018 08:55	Samsat KCP BJB Cibarusah	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	5	
				91	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN FEBRUARI 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (menit)	KETERANGAN
02/02/2018 09:42	Samsat Outlet Technomart	VPN IP Down	Revisi jaringan Indoor Kabel putus kena tukang Bangunan	392	
07/02/2018 14:13	Samsat Outlet Sabusu	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	90	
07/02/2018 14:23	P3D Wilayah Kab. Bandung Barat	Indihome Down	Revisi jaringan luar	146	
07/02/2018 16:21	Backhaul Bapenda Jabar	Astinet Down	Pelurusan jaringan luar	169	Pelayanan normal via backup
07/02/2018 16:31	Data Centre Collocation Purwakarta	VPN IP Down	Pelurusan jaringan luar	158	
				955	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN MARET 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
01/03/2018 09:50	P3D Wilayah Kab. Bandung I Rancekek	Indihome Down	Revisi jaringan luar	34	

02/03/2018 15:21	Backhaul Bapenda Jabar	VPN IP Down	Pelurusan jaringan luar	27	Pelayanan normal via backup
03/03/2018 13:59	Samsat Outlet ITC	VPN IP Down	Revisi jaringan indoor Ganti core optik karena kelipat	72	
05/03/2018 11:52	P3D Wilayah Kota Bandung III Soetta	VPN IP Down	Revisi jaringan luar Tarik optik karena ketekuk	299	Pelayanan normal via backup
06/03/2018 14:07	Samsat KCP BJB Surade	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	170	
07/03/2018 14:25	P3D Wilayah Kab. Cianjur	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	23	Pelayanan normal via backup
09/03/2018 09:21	Samsat Outlet Lucky Square	VPN IP Down	Ganti modem rusak karena kena air	127	
09/03/2018 11:06	Samsat Drive Thru Ahmad Yani	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	38	
10/03/2018 09:27	Samsat Outlet Lottemart	VPN IP Down	Revisi jaringan indoor Ganti core optik karena kelipat	159	
12/03/2018 08:16	P3D Wilayah Kota Tasikmalaya	VPN IP Down	Rekonfig Parameter Telkom	159	Pelayanan normal via backup
14/03/2018 13:59	Samsat KCP BJB Leuwiliang	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	54	
20/03/2018 08:16	P3D Wilayah Kab. Cianjur	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	91	Pelayanan normal via backup
22/03/2018 11:22	Samsat Online 3 Provinsi Jakarta	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	78	
				1331	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN APRIL 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
02/04/2018 08:59	Samsat KCP BJB Cikajang	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	150	
02/04/2018 10:04	P3D Wilayah Kab. Pangandaran	Indihome Down	Revisi Jaringan luar	247	
06/04/2018 10:12	Samsat KCP BJB Wanayasa	VPN IP Down	Masalah di sisi catu daya Pelanggan	239	
09/04/2018 10:10	P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	151	Pelayanan normal via backup
09/04/2018 13:02	P3D Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	VPN IP Down	Revisi Jaringan Indoor	125	Pelayanan normal via backup
09/04/2018 13:53	Samsat KCP BJB Surade	VPN IP Down	Gangguan masal	5	
09/04/2018 15:05	P3D Wilayah Kab. Bandung Barat	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	153	Pelayanan normal via backup

10/04/2018 00:00	P3D Wilayah Kab. Bandung Barat	Indihome Down	Revisi Jaringan luar	136	
12/04/2018 11:19	Samsat KCP BJB Sawangan	Down	Revisi Jaringan luar	157	
				1363	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN MEI 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
17/05/2018 09:57	Samsat KCP BJB Sawangan	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	353	
24/05/2018 13:57	Samsat Outlet Metland	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	117	
28/05/2018 13:33	P3D Wilayah Kota Cimahi	Indihome Down	Rekonfig ulang	308	
31/05/2018 11:28	P3D Wilayah Kab. Pangandaran	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	219	Pelayanan normal via backup
31/05/2018 14:00	Samsat KCP BJB Cililin	VPN IP Down	Revisi Jaringan luar	22	
				1019	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN JUNI 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
21/06/2018 10:31	Samsat KCP BJB Babelan	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	165	
25/06/2018 08:24	P3D Wilayah Kota Bogor	VPN IP Down	Revisi jaringan luar putus kena pembentahan gedung	208	Pelayanan normal via backup
25/06/2018 12:30	P3D Wilayah Kota Cimahi	VPN IP Down	revisi Core optik di ODP	88	Pelayanan normal via backup
				461	

LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT BULAN JULI 2018

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
04/07/2018 14:33	P3D Wilayah Kota Cirebon	VPN IP Down	Pelurusan jaringan luar karena ketarik truk	71	Pelayanan normal via backup
11/07/2018 11:33	P3D Wilayah Kota Bogor	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	208	Pelayanan normal via backup
13/07/2018 08:39	Samsat Outlet Sabusu	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	85	
23/07/2018 08:47	P3D Wilayah Kab Subang	VPN IP Down	Rekonfig parameter perangkat telkom	252	Pelayanan normal via backup

24/07/2018 09:44	Samsat KCP BJB Limbangan	VPN IP Down	sambung ulang ku optik Gangguan masal imbas kena becko	376	
24/07/2018 11:58	P3D Wilayah Kab Subang	Indihome Down	Rekonfig parameter perangkat telkom	223	
26/07/2018 08:16	P3D Wilayah Kab Pangandaran	VPN IP Down	Rekonfig parameter perangkat telkom	93	Pelayanan normal via backup
27/07/2018 08:10	P3D Wilayah Kota Cimahi	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	152	Pelayanan normal via backup
27/07/2018 09:46	Samsat Drive Thru Ahmad Yani Bekasi	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	275	
				1735	

**LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT
BULAN AGUSTUS 2018**

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
06/08/2018 11:27	P3D Wilayah Kota Bekasi	Indihome Down	Revisi jaringan luar	253	
07/08/2018 08:15	P3D Wilayah Kota Bekasi	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	197	Pelayanan normal via backup
08/08/2018 09:20	Samsat KCP BJB Wanayasa	VPN IP Down	Migrasi ke Optik dari kabel tembaga	138	
15/08/2018 08:42	Samsat Outlet Tritan Point	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	70	
15/08/2018 14:16	Samsat Outlet Lucky Square	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	45	
15/08/2018 15:12	P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Indihome Down	Revisi jaringan luar	77	
16/08/2018 08:04	P3D Wilayah Kota Bekasi	VPN IP Down	Kabel outdoor putus ketarik truk	480	Pelayanan normal via backup
16/08/2018 10:37	P3D Wilayah Kab Karawang	VPN IP Down	Gamas Perangkat Telkom Outdoor	41	Pelayanan normal via backup
17/08/2018 10:02	P3D Wilayah Kab Bogor	VPN IP Down	Reset router	100	Pelayanan normal via backup
20/08/2018 08:24	P3D Wilayah Kab Garut	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	120	Pelayanan normal via backup
27/08/2018 13:38	P3D Wilayah Kab Pangandaran	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	77	Pelayanan normal via backup
31/08/2018 09:51	Samsat Outlet Kawali	VPN IP Down	Migrasi ke Optik	40	
				1638	

**LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT
BULAN SEPTEMBER 2018**

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
04/09/2018 14:58	Samsat KCP BJB Pangalengan	VPN IP Down	Imbas Gamas kabel tembaga solusi migrasi ke optik	9	
12/09/2018 14:36	P3D Wilayah Kota Sukabumi	VPN IP Down	Revisi Jaringan indoor karena di gigit tikus	84	Pelayanan normal via backup
19/09/2018 09:49	Samsat Outlet BTM Bogor	VPN IP Down	Revisi Jaringan indoor karena di gigit tikus	26	
24/09/2018 09:12	Samsat Outlet BTM Bogor	VPN IP Down	Ganti sambungan kabel indoor	102	
24/09/2018 10:52	Samsat KCP BJB Cikajang	VPN IP Down	Imbas Gamas 02 Dslam	9	
				230	

**LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT
BULAN OKTOBER 2018**

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
03/10/2018 08:05	Samsat Outlet Baleendah	VPN IP Down	Sambung jaringan indoor karena putus tertarik pekerjaan bangunan	130	
04/10/2018 09:42	P3D Wilayah Kab Garut	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	198	Pelayanan normal via backup
12/10/2018 09:46	Samsat KCP BJB Sawangan	VPN IP Down	Revisi jaringan luar karena putus kena pekerjaan penebangan pohon pemda	332	
13/10/2018 10:18	Samsat KCP BJB Ciasem	VPN IP Down	Revisi kabel Indoor gedung	104	
23/10/2018 08:45	Samsat KCP BJB Cikajang	VPN IP Down	Imbas Gamas kabel tembaga dicuri solusi pindah ke optik	127	
30/10/2018 08:15	Samsat KCP BJB Sawangan	VPN IP Down	Revisi kabel Indoor karena di gigit tikus	149	
				1040	

**LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT
BULAN NOVEMBER 2018**

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
02/11/2018 13:27	P3D Wilayah Kab Karawang	VPN IP Down	Revisi jaringan Luar	120	Pelayanan normal via backup
06/11/2018 09:34	Samsat KCP BJB Cileungsri	VPN IP Down	Migrasi	221	
12/11/2018 10:38	P3D Wilayah Kab Cianjur	Indihome Down	Revisi jaringan Luar	55	

14/11/2018 08:29	P3D Wilayah Kota Tasikmalaya	VPN IP Down	Revisi jaringan Luar	156	Pelayanan normal via backup
15/11/2018 15:33	P3D Wilayah Kab Pangandaran	VPN IP Down	Revisi jaringan Luar	27	Pelayanan normal via backup
29/11/2018 08:58	P3D Wilayah Kota Bogor	VPN IP Down	Ganti perangkat Telkom	262	Pelayanan normal via backup
30/11/2018 08:28	Samsat Outlet Metland	VPN IP Down	Revisi jaringan Luar	140	
				981	

**LAPORAN GANGGUAN JARINGAN TITIK PELAYANAN SAMSAT
BULAN DESEMBER 2018**

TANGGAL (Jam)	TITIK LAYANAN	JENIS GANGGUAN	SOLUSI	LAMA GANGGUAN (Menit)	KETERANGAN
04/12/2018 09:47	Samsat Outlet Banjarsari	VPN IP Down	Imbas Gamas Transport	111	
07/12/2018 09:39	P3D Wilayah Kota Tasikmalaya	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	226	Pelayanan normal via backup
11/12/2018 09:04	P3D Wilayah Kab Cianjur	VPN IP Down	Kabel lan tercabut oleh PSB lintas artha polisi	88	Pelayanan normal via backup
13/12/2018 14:51	P3D Wilayah Kab Bandung II Soreang	VPN IP Down	Imbas Gamas Kabel kena galian	69	Pelayanan normal via backup
14/12/2018 10:55	P3D Wilayah Kab Cianjur	Indihome Down	Revisi jaringan luar	224	
18/12/2018 15:08	Samsat Outlet Metland	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	52	
26/12/2018 08:43	Samsat Outlet Bekasi Junction	VPN IP Down	revisi jaringan dalam Instalasi kabel gedung	437	
26/12/2018 10:36	P3D Wilayah Kab Kuningan	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	232	Pelayanan normal via backup
31/12/2018 11:12	P3D Wilayah Kab Sumedang	VPN IP Down	Revisi jaringan luar	33	Pelayanan normal via backup
				1472	

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH TITIK LAYANAN	JAM LAYANAN (per tahun)
1	Samsat Induk	34	81.600
2	Samsat Outlet	20	39.216
3	Samsat KCP	30	57.600
4	Samsat Drive Thru	2	4.672
5	Samsat Keliling	48	57.600
6	Samsat Gendong	68	81.600

7	E-Samsat (backhaul)	1	8.760
TOTAL JAM LAYANAN			331.048

PERHITUNGAN REALISASI TINGKAT GANGGUAN JARINGAN DAN SISTEM SAMSAT ONLINE SENTRALISASI & E-SAMSAT

Dengan asumsi :

1. Pelayanan samsat induk : 292 hari x 34 samsat induk x 8 jam= 81.600 jam (asumsi 1 tahun = 292 hari pelayanan)
2. Pelayanan samsat outlet : 344 hari x 19 samsat outlet x 6 jam= 39.216 jam (asumsi 1 tahun = 344 hari pelayanan)
3. Pelayanan samsat kcp : 240 hari x 30 samsat kcp bjb x 8 jam= 57.600 jam (asumsi 1 tahun = 240 hari pelayanan)
4. Pelayanan samsat Drive Thru : 292 hari x 2 samsat Drive Thru x 8 jam= 4.672 jam (asumsi 1 tahun = 292 hari pelayanan)
5. Pelayanan samsat keliling : 240 hari x 48 samsat keliling x 5 jam= 57.600 jam (asumsi 1 tahun = 240 hari pelayanan)
6. Pelayanan samsat gendong : 240 hari x 68 samsat gendong x 5 jam= 81.600 jam (asumsi 1 tahun = 240 hari pelayanan)
7. Pelayanan E-Samsat : 365 hari x 24 jam = 8.760 jam (asumsi 1 tahun = 365 hari pelayanan)

Total jam pelayanan : 331.048 jam

Total jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun : **12.136 menit atau 202,27 jam**

Total jam pelayanan seluruh titik pelayanan : **331.048 jam**

Persentase jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun: $202,27/331.048 \times 100\% = 0,06\%$

KETERANGAN : Khusus Samsat Induk P3D telah memiliki Backup Link VPN sehingga gangguan yang terjadi pada link utama tidak berdampak terhadap jam pelayanan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \\
 &= \frac{(2 \times 1,2) - 0,06}{1,2} \times 100\% \\
 &= \frac{2,34}{1,2} \times 100\% \\
 &= 195,00\%
 \end{aligned}$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Rekap sebaran perangkat IT lingkup Bapenda Provinsi Jawa Barat

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH GANGGUAN PERANGKAT
1	Thin Client	1,426	9

2	Printer OKI 1120	427	7
3	Printer OKI 395	501	4
4	Printer High Speed	42	0
5	UPS	102	3
6	Router	152	2
7	Switch Hub	199	5
		2,849	30

Jumlah Perangkat seluruhnya: **2,849**

Jumlah Gangguan dalam setahun : **30**

Persentase gangguan dalam setahun : $30 / 2,849 \times 100\% = 0,01\%$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian} &= \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \\
 \text{Rencana Tingkat Capaian} &= \frac{(2 \times 1,2) - 0,01}{1,2} \times 100\% \\
 &= \frac{2,39}{1,2} \times 100\% \\
 &= 199,17\%
 \end{aligned}$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	%	90	97,52	105,82	108,36

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

No,	Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD	Capaian
1.	Rapat Identifikasi	1	1	54	48	88,89
2.	Rakor PBBKB	1	1	27	24	88,89
3.	Rapat Teknis PBBKB	3	3	27	24	88,89
4.	Rakor Pajak Rokok	1	1	27	24	88,89
5.	Rapat Koordinasi DBHCHT	1	1	27	24	88,89
6.	Rapat Koordinasi PPH	1	1	27	24	88,89
7.	Rekonsiliasi PAD	4	4	27	22	100,00
8.	Workshop	0	1	1	1	100,00
9.	Focus Group Discussion	0	1	1	1	100,00
10.	Rapat pembahasan Target	5	5	10	10	100,00
11.	SBO	5	5	10	10	100,00
12.	Rakor Lifting Migas	4	1	27	27	100,00
13.	Lifting	4	4	5	5	100,00
14.	Rekon Dana Bagi Hasil	4	4	5	5	100,00
	Jumlah	31	1.365	1.365	1.365	1.365
			Rata-Rata Capaian			97,52
			Target Renstra			90.00

Tabel 3.3.7.1 OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan Sumber Pendapatan II

Dengan demikian maka realisasi Prosentase Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan yaitu sebesar 97,52% sehingga bila dibandingkan dengan target 2018 maka Capaian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebesar:

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{97,52}{90} \times 100\% = 108,36\%$$

kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Tabel 3.3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Ketepatan Dan Keakuratan Pelaporan Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		
1.	Prosentasi tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	%	5	4,44	200	111,20
2.	Persentase Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	96	99,62	104,17	103,77
3.	Jumlah temuan SPI antar tahun	%	250	146	98,33	141,60
4.	Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	N/A	N/A	100
5.	Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	Point	82,5	83,18	100,60	100,57

Prosentasi tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan hasil pemeriksaan, pembinaan dan pengendalian terhadap Pusat Pendapatan Daerah P3D Tahun 2018 maka diketahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan SOP sebanyak 8 SOP atau sebesar 4,44 dari target 9 SOP atau 5% dengan rincian :

1. Pelayanan Pengecekan Pajak Progresif (88.137.2018)
2. Realisasi Penerimaan dan Penyetoran (88.153.2018)
3. Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (88.142.2018)
4. Proses Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan LS/GU (88.117.2018)
5. Penerimaan, Penyimpanan dan Pelaporan Barang (88.119.2018)
6. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pemanfaatan Barang) (80.05.2018)
7. Daftar Urut Kepangkatan PNS (88.113.2018)
8. Penyusunan Program Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (88.110.2018)

Sedangkan untuk standar pelayanan tidak ada deviasi.

Dengan demikian maka capaian kinerjanya adalah :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Pencapaian} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 & = \frac{(2 \times 5) - 4,44}{5} \times 100\% \\
 & = \frac{5,56}{5} \times \\
 & = 111,20\%
 \end{aligned}$$

Persentase penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian Laporan Bulanan selama kurun waktu tahun 2018 tercapai sebesar 99,62% dengan rincian terlampir

REKAPITULASI PENILAIAN KEAKURATAN LAPORAN BULANAN P3D LAPORAN BULAN : Desember 2018										
NO	PUTUS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KETEPATAN			JUMLAH	KEAKURATAN			JUMLAH	NILAI TOTAL
		PENDAPATAN	BELANJA	BARANG		PENDAPATAN	BELANJA	BARANG		
		%	%	%		%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11.00
1	WILAYAH DEPOK I	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
2	WILAYAH DEPOK II CINERE	100	100	100	100	99,97	100,00	97,92	99,29	99,65
3	WILAYAH KAB. BOGOR CIBINONG	100	100	100	100	99,97	97,22	100,00	99,06	99,53
4	WILAYAH KOTA BOGOR	100	100	100	100	99,33	97,91	100,00	99,08	99,54
5	WILAYAH KOTA SUKABUMI	100	100	100	100	99,97	95,14	98,96	98,02	99,01
6	WILAYAH KAB. SKBMII I, CIBADAK	100	100	100	100	99,97	98,61	97,92	98,83	99,42
7	WILAYAH KAB. SKBMII II, PEL. RATU	100	100	100	100	99,97	100,00	97,92	99,29	99,65
8	WILAYAH KAB. CIANJUR	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
9	WILAYAH KOTA BEKASI	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
10	WILAYAH KAB. BEKASI - CIKARANG	100	100	100	100	99,97	94,44	95,83	96,75	98,37
11	WILAYAH KAB. KARAWANG	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
12	WILAYAH KAB. PURWAKARTA	100	100	100	100	99,97	98,61	97,92	98,83	99,42
13	WILAYAH KAB. SUBANG	100	100	100	100	99,97	97,91	95,83	97,91	98,95
14	WILAYAH KOTA CIREBON	100	100	100	100	99,97	99,30	100,00	99,76	99,88
15	WILAYAH KAB. CIREBON I SUMBER	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
16	WILAYAH KAB. CIREBON II CILEDUG	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
17	WILAYAH KAB. INDRAMAYU I	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
18	WILAYAH KAB. INDRAMAYU II HGLS	100	100	100	100	99,97	98,61	96,88	98,48	99,24
19	WILAYAH KAB. KUNINGAN	100	100	100	100	99,97	100,00	98,96	99,64	99,82
20	WILAYAH KAB. MAJALENGKA	100	100	100	100	99,97	100,00	97,92	99,29	99,65
21	WILAYAH KOTA BDG I PAJAJARAN	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
22	WILAYAH KOTA BDG II KAWALUYAAN	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
23	WILAYAH KOTA BDG III S. HATTA	100	100	100	100	99,97	99,30	97,92	99,06	99,53
24	WILAYAH KAB. BANDUNG BARAT	100	100	100	100	99,97	100,00	97,92	99,29	99,65
25	WILAYAH KAB. BDG I RANCÄKEK	100	100	100	100	99,97	96,52	89,58	95,36	97,68
26	WILAYAH KAB. BDG II SOREANG	100	100	100	100	99,97	100,00	97,92	99,29	99,65
27	WILAYAH KAB. SUMEDANG	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
28	WILAYAH KAB. GARUT	100	100	100	100	99,97	98,61	100,00	99,53	99,76
29	WILAYAH KOTA TASIKMALAYA	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
30	WILAYAH KAB. TASIKMALAYA SKRJ	100	100	100	100	99,97	99,30	100,00	99,76	99,88
31	WILAYAH KAB. CIAMIS I	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
32	WILAYAH KAB. CIAMIS II PGNDARAN	100	100	100	100	99,97	95,14	100,00	98,37	99,18
33	WILAYAH KOTA CIMAH	100	100	100	100	99,97	98,61	100,00	99,53	99,76
34	WILAYAH KOTA BANJAR	100	100	100	100	99,97	100,00	100,00	99,99	99,99
									NILAI AKHIR	99,62

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka Persentase penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dari target yang ditetapkan sebesar 96% tercapai sebesar 100 maka pencapaian kinerjanya adalah :

$$\text{Target} = \frac{\text{Realiasi}}{100\%} \times 100\% = \frac{99,62}{96} \times 100\% = 103,77\%$$

dengan kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016	JUMLAH TEMUAN 2017	JUMLAH TEMUAN 2018
1	Kota Depok I	7	5	3
2	Kota Depok II Cinere	14	4	5
3	Kabupaten Bogor	10	5	5
4	Kota Bogor	8	11	5
5	Kota Sukabumi	6	5	6
6	Kab, Sukabumi I Cibadak	6	8	4
7	Kab, Sukabumi II Pelabuhanratu	20	17	3
8	Kabupaten Cianjur	15	9	4
9	Kota Bekasi	14	14	4
10	kabupaten Bekasi	11	21	5
11	Kabupaten Karawang	7	11	2
12	Kabupaten Purwakarta	9	20	7
13	Kabupaten Subang	11	4	5
14	Kota Cirebon	12	11	4
15	Kab, Cirebon I Sumber	5	4	6
16	Kab, Cirebon II Ciledug	16	2	3
17	Kab, Indramayu I	9	6	6
18	Kab, Indramayu II Haurgeulis	13	8	4
19	Kabupaten Kuningan	6	8	4
20	kabupaten Majalengka	9	4	2
21	Kota Bandung I Pajajaran	4	5	5
22	Kota Bandung II Kawaluyaan	31	11	3
23	Kota Bandung III Soekarno-Hatta	5	3	6
24	Kabupaten Bandung Barat	8	7	4

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016	JUMLAH TEMUAN 2017	JUMLAH TEMUAN 2018
25	Kab, Bandung I Rancaekek	9	6	4
26	Kab, Bandung II Soreang	10	4	5
27	Kabupaten Sumedang	9	8	4
28	Kabupaten Garut	4	5	4
29	Kota Tasikmalaya	6	10	5
30	Kabupaten Tasikmalaya	5	12	5
31	Kabupaten Ciamis	8	10	3
32	Kabupaten Pangandaran	14	20	2
33	Kota Cimahi	20	20	5
34	Kota Banjar	12	7	4
	Jumlah	333	305	146

Jumlah temuan Satuan Pegawas Intern (SPI) Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang secara reguler melakukan pemeriksaan terhadap Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat yaitu sebanyak 146 temuan yang terdiri berbagai aspek Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), aspek belanja, aspek pendapatan, aspek pengelolaan barang daerah dan aspek sumberdaya manusia.

Dengan demikian maka Capaian Kinerja Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun adalah

$$\begin{aligned}
 & : \\
 \text{Percentase Pencapaian} & = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 & = \frac{(2 \times 250) - 146}{250} \times 100\% \\
 & = \frac{354}{250} \times 100\% \\
 & = 141,60\%
 \end{aligned}$$

Kategori Sangat Memuaskan (AA)

Percentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan untuk tahun 2018 masih dalam proses penyusunan sehingga data belum tersedia.

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 201 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat 83,18 sehingga capaian kinerjanya adalah

$$= \frac{\text{Target}}{\text{Realiasi}} \times 100\% = \frac{83,18}{82,5} \times 100\% = 100,82\%$$

= $83,18/82,5 \times 100 = 100,82$ kategori sasaran **Sangat Memuaskan (AA)**

Berikut adalah Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
BANDAR PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT
2018**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT

JALAN SURAPATI NO. 4 TELP. (022) 4237174 - 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id

BANDUNG - KODE POS 40115

Bandung, 10 Juli 2018

Nomor	:	700.04/838/Insp	Yth.	Kepala Badan Pendapatan
Sifat	:	-		Daerah Provinsi Jawa Barat
Lampiran	:	1 (satu) berkas		
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.	. Di	
				Bandung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penilaian secara akumulatif terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pemeringkatan dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup) C (Kurang), dan D (Sangat Kurang). Predikat tertinggi adalah AA sedangkan predikat terendah adalah D.

Nilai yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar **83,18%** atau dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian Terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja.

a. Perencanaan Kinerja

Nilai yang diperoleh atas Perencanaan Kinerja adalah sebesar 27,99 atau setara 93,30%.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang penyajiannya memiliki unsur-unsur kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan. Selain itu tujuan dalam Renstra telah berorientasi hasil, indikator tujuan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, sasaran telah berorientasi pada hasil, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, target kinerja ditetapkan dengan baik, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran, Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai yang diperoleh atas Pengukuran Kinerja adalah sebesar 20,31 atau setara 81,25%.

Pada Komponen Pengukuran Kinerja untuk Sub Pemenuhan Pengukuran telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, terdapat ukuran kinerja tingkat aselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya, terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dipublikasikan

c. Pelaporan Kinerja

Nilai yang diperoleh atas Pelaporan Kinerja adalah sebesar 13,11 atau setara 87,39%.

Pada sub komponen Pelaporan Kinerja telah menyajikan pencapaian IKU, disampaikan tepat waktu dan ditampilkan dalam website Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk sub komponen Penyajian Informasi Kinerja telah menyajikan sasaran yang berorientasi outcome, informasi kinerja yang telah diperjanjikan, dianalisis serta hasilnya telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja, perbaikan perencanaan dan menilai kinerja organisasi.

Namun demikian, dalam Laporan Kinerja masih terdapat kelemahan yang berhubungan dengan sub komponen Penyajian Informasi Kinerja, yaitu belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan terutama perbandingan data realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan perbandingan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

d. Evaluasi Internal

Nilai yang diperoleh atas Evaluasi Internal sebesar 7,43 atau setara 74,33%.

Pada Komponen Evaluasi Internal telah terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, dan hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pada sub komponen Kualitas Evaluasi, bahwa evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Namun demikian dalam sub komponen Pemanfaatan Evaluasi Kinerja masih terdapat kelemahan yaitu belum sepenuhnya hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Nilai yang diperoleh atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 14,34 atau setara 71,69%.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menginformasikan mengenai (output dan outcome) yang dapat diandalkan, yaitu didukung dengan data yang diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari sumber yang kompeten, dapat ditelusuri sumbernya, dapat diverifikasi dan *up to date*.

Rincian lebih lanjut hasil penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disajikan terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Evaluasi ini.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun lalu

Rekomendasi hasil evaluasi tahun lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, seluruh jajaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan manajemen kinerja.

3. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, direkomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya supaya :

- a. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

- b. Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata; dan
- c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai laporan
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	
		Y	NII AI
1	2	3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30,00	93,30%	27,99
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	91,39%	9,14
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	94,44%	1,89
1 Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2 Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,75
8 Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9 Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	100,00%	5,00
10 Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12 Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14 Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00
17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25
18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20 Dokumen Renstra telah direview secara berkala		B	0,75
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	94,25%	18,85
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	93,75%	3,75
1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3 PK telah menyajikan IKU		B	0,75
4 PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00
5 Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7 Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00

9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	85,00%	5,10
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
I. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	81,25%	20,31
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	85,00%	10,63
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0,75

20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
	PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	87,39%	13,11
	I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	93,75%	2,81
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
	II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	89,29%	6,70
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75
	III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	80,00%	3,60
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75
	D. EVALUASI INTERNAL (10%)	10,00	74,33%	7,43
	I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%	1,88
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
	II. KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	73,67%	3,68
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu :

1. Tahun 2018 tidak dilakukan Pemutahiran atas temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat karena Tahun 2018 Inspektorat tidak melakukan Pemeriksaan paa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) masih dalam proses sehingga belum dapat menyajikan Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan.

Tabel 3.3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya kualitas SDM

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		
1	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% %	35,5 19,2	42,45 22,05	105,00 101,66	114,92% 115,21% 113,56%
2	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	79	299,09	123,00	310,80%
3	Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	13	46,46	147,00	264,17%

Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kelompok Pendidikan sampai dengan Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

SD	: 13 orang
SMP	: 15 orang
SMA	: 241 orang
Sarjana Muda	: 29 orang

Strata 1	: 360 orang
Strata 2	: 187 orang
Strata 3	: 3 orang
Jumlah	: 848 orang

Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S1 sampai dengan Tahun 2018 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-1}}{\sum \text{Karyawan Bapenda 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{360}{848} \times 100\% = 42,45\%$$

Dengan demikian capaian kinerjanya adalah $40,44/35,31 \times 100\% = 115,21$ **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S2 sampai dengan Tahun 2018 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Aparatur S-2}}{\sum \text{Pegawai Bapenda 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{187}{858} \times 100\% = 22,05\%$$

Dengan demikian capaian kinerjanya adalah $22,05/19,2 \times 100\% = 115,00$ **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Berdasarkan table diatas bahwa setiap pengajuan ijin belajar harus online melalui skp.jabarprov.go.id karena sudah diatur kuota pemohon dan jurusan yang linier berdasarkan analisis dan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Teknis Subtantif yaitu sebanyak sampai dengan Tahun 2018 jika diasumsikan perhitungannya dari Tahun Anggaran 2014- 2018 yaitu sebagai berikut:

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bintek Pengelolaan Sistem Kearsipan	72	70	70	68	
2.	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	72	70	-	-	
3.	Bintek Pengelolaan Barang Daerah	72	70	70	-	
4.	Bintek Pengelolaan Barang dan Jasa	50	70	70	-	
5.	Bintek Aplikasi Samsat	50	70	70	-	

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)				
		2014	2015	2016	2017	2018
6.	Bintek Perhitungan Pajak Daerah	-	70	70	68	
7.	Bimtek Aplikasi Perkantoran					120
8.	Bintek Penyelidikan dan Penyidikan Pajak Daerah bagi PPNS	-	-	30	-	
9.	Bimtek Pembinaan Mental Aparatur	-	-	-	-	2
10.	Bimtek dan Ujian Nasional Sertifikasi Barjas	-	-	-	59	124
11.	Bimtek Microsoft Office Specialist Excel	-	-	-	-	9
12.	Bimtek Reform Leader Acadamy	-	-	-	-	3
13.	Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan dan Alih Media Arsip Kepegawaian	-	-	-	-	41
14.	TOT Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	6	
15.	Bimtek Teknik dan Penyusunan HPS	-	-	-	2	
16.	Diklat Audit Operasional Pemda	-	-	-	12	
17.	Diklat Audit Kinerja Pemerintah	-	-	-	-	9
18.	Diklat Dasar-dasar Audit	-	-	-	6	9
19.	Diklat Penyusunan RPJMD/Rentra	-	-	-	2	
20.	Diklat Penyusunan LKIP	-	-	-	3	
21.	Diklat Peningkatan Mutu Kinerja Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	57
22.	Bimtek Audit atas Pengelolaan Sapras	-	-	-	-	4
23.	Diklat Manajemen Kepegawaian					8
24.	Diklat Pembinaan Manajemen Pengamanan	-	-	-	10	
25.	Diklat TOT Legal Drafting	-	-	-	2	
26.	Bimtek PDRD	-	-	-	18	
27.	Bimtek Adm Fungsional Pranata Komputer	-	-	-	3	
28.	Bimtek Sist. Akuntansi Pemerintah Akrual	-	-	-	1	
29.	Diklat Manajemen Kearsipan	-	-	-	1	
30.	Diklat Teknis Umum Penatausahaan Keuangan	-	-	-	4	4
31.	Pelatihan Service Excellent & Hypno Com	-	-	-	-	68
32.	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah	-	-	-	2	
33.	Pembekalan Basic Life Support	-	-	-	2	
34.	Training Integrated Human Resource Development Application	-	-	-	1	
35.	Short Course Performance Appraisal	-	-	-	1	

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)				
		2014	2015	2016	2017	2018
36.	Diklat Umum Adm. Kepegawaian	-	-	-	20	
37.	Diklat Analis Jabatan	-	-	-	2	
38.	Bimtek Intelejen	-	-	-	5	
39.	Bimbingan Pemberkasan bagi PPNS	-	-	-	2	
40.	Bimtek Manajemen Kepegawaian	-	-	-	8	
41.	Reformulating Strategy In The Era Of Disruption	-	-	-	40	
42.	Diklat Terpadu PTPK	-	-	-	5	
43.	Diklat Widya Iswara	-	-	-	1	
44.	Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS	-	-	-	15	
45.	Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-	4	
46.	Uji Kompetensi Bagi Pelaksana	-	-	-	572	
47.	Bimtek Aplikasi Udin dan PI	-	-	-	2	
	Jumlah Tahun	316	420	380	964	458
	Jumlah sampai dengan tahun 2018	2538				

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Bintek sd TA 2018}}{\sum \text{Pegawai Bapenda 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.538}{858} \times 100\% = 299,29\%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $299,29/79 *100\% = 379,48\%$ dengan **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Berdasarkan tabel diatas Penataan ASN melalui Pendidikan dan Latihan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. Penyiapan sumber daya aparatur yang cakap memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Dan saat ini berdasarkan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pendidikan dan Latihan harus berkompetensi tetapi pada kenyataannya lembaga sertifikasi masih sedikit yang linier dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Persentase Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi yaitu sebagai berikut :

No,	Sertifikat Kompetensi Profesi	Jumlah Peserta (orang)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	29	-	-		
2	Auditor	4	2	5	12	18
3	Perawat Gigi	-	1	-		
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	26	-	3	11	104
5	Akuntansi	10	-	-	-	
6	Perpajakan	10	-	-	-	
7	Jafung Analis Kepegawaian Tingkat Ahli	-	-	2	-	
8	Jafung Arsiparis	-	1	-	3	
9	Jafung Pustakawan	1			-	
10	Penyusun Renstra SKPD	-	2	-	2	
11	Sertifikasi Jaringan Komputer	-	4	-	4	
12	Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP)	-	-	1	3	
13	Penatausahaan Keuangan	-	-	2	4	
14	Diklat Bidang Pendapatan	-	-	30	-	
15	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	6	15	
16	Diklat Analis Jabatan				2	
17	Diklat Teknis Manajemen Kearsipan	-	-	3	1	
18	Diklat Manajemen Kepegawaian				8	
19	Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual	-	-	16	1	
20	Jafung Widya Iswara	-	-	-	1	
21	Diklat TOT Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	6	
22	Diklat TOT Legal Drafting	-	-	-	2	
23	Bimtek Teknik dan Penyusunan HPS	-	-	-	2	
24	Bimtek PDRD	-	-	-	18	
25	Diklat Umum Adm. Kepegawaian	-	-	-	20	
Jumlah Tahun		79	10	68	115	122
Jumlah sampai dengan Tahun 2017		394				

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Sertifikat Kompetensi Profesi sd TA 2018}}{\sum \text{Pegawai Bapenda 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{394}{858} \times 100\% = 46,46\%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $46,46/13 *100\% = 357,38\%$ dengan **Kategori Sangat Memuaskan (AA)**

Terpenuhinya Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dikarenakan terdapat tambahan dari yang memiliki Sertifikasi barang dan Jasa Pemerintahan. Berdasarkan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Pendidikan dan Latihan harus berkompetensi tetapi pada kenyataannya lembaga sertifikasi masih sedikit yang linier dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TERHADAP RPJMD 2018
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1.	Persentase kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	62,37%	50%	124,74%
		2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	75,35%	86%	87,62%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3.	Jumlah potensi wajib pajak, a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	18,7kmb 877 wp 30 Wapu	18,4juta kbm 785 wp 28 Wapu	102,00% 112,72% 107,14
		4.	Jumlah Wajib Retribusi	169 wr	170wr	99,41%
		5.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	40 objek	35 objek	102,86%
		6.	Persentase potensi wajib pajak/wajib pungut yang terpungut	75,29%	75%	100,38%
		7.	Persentase potensi wajib retribusi yang terpungut	110,45%	90%	122,72%
3	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	8.	Persentase Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	135,11%	100%	135,11%
		9.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,04%	82,8%	101,50%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TERHADAP RPJMD 2018
5	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	10.	Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	1:156	1:200	122,00
		11.	Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	100%	100%	100%
		12.	Persentase Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100%	100%	100%
6	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	13.	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	0,06%	1,2%	195,00%
		14.	Persentase Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	0,01%	1,2%	199,17%
7	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	15.	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	97,52%	90%	108,36%
8	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	16.	Persentase Tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	4,44%	5%	111,20%
		17.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	99,62%	96%	103,77%
		18.	Jumlah temuan SPI antar tahun	146%	250%	141,60%
		19.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100%	100%	100%
		20.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai,	83%	82,5%	100,82%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TERHADAP RPJMD 2018
9	Meningkatnya kualitas Aparatur	21.	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	42,45% 55,05%	35,2% 19,2%	114,92% 115,21% 113,56%
		22.	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substanstif	299,09%	79%	310,80%
		23.	Persentase Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Profesi	46,46 %	13%	264,17%

3.5 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Kinerja Dan Anggaran Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	10	16,24	162,40%	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	28.984.539.308	25.347.411.162	87.45
2	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	10	16,24	162,40%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	455.650.000	446.565.820	98.01
3	Meningkatnya kualitas aparatur	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	35,2	40,44	114,89%	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	2.484.450.000	2.356.813.850	94.86
4	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8	82,3	99,40%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	164.895.014.724	155.854.862.616	94.52
5	Meningkatnya kualitas aparatur	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	79	242,42	306,86%	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	2.389.150.000	1.853.949.759	77.60
6	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	1,2	1	83,33%	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	59.641.513.017	55.887.462.547	93.71
7	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)	96	100	104,17%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	304.355.000	263.016.500	86.42
8	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100	100	100,00%	Administrasi Perkantoran	71.215.607.624	66.091.589.194	92.80
9	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100	100	100,00%	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1.138.060.000	1.042.225.600	91.58
10	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	1,2	0,01	198,28%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	643.150.000	635.612.600	98.83
RATA-RATA				123,43%			332.151.489.681	309.779.509.657	93.26

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

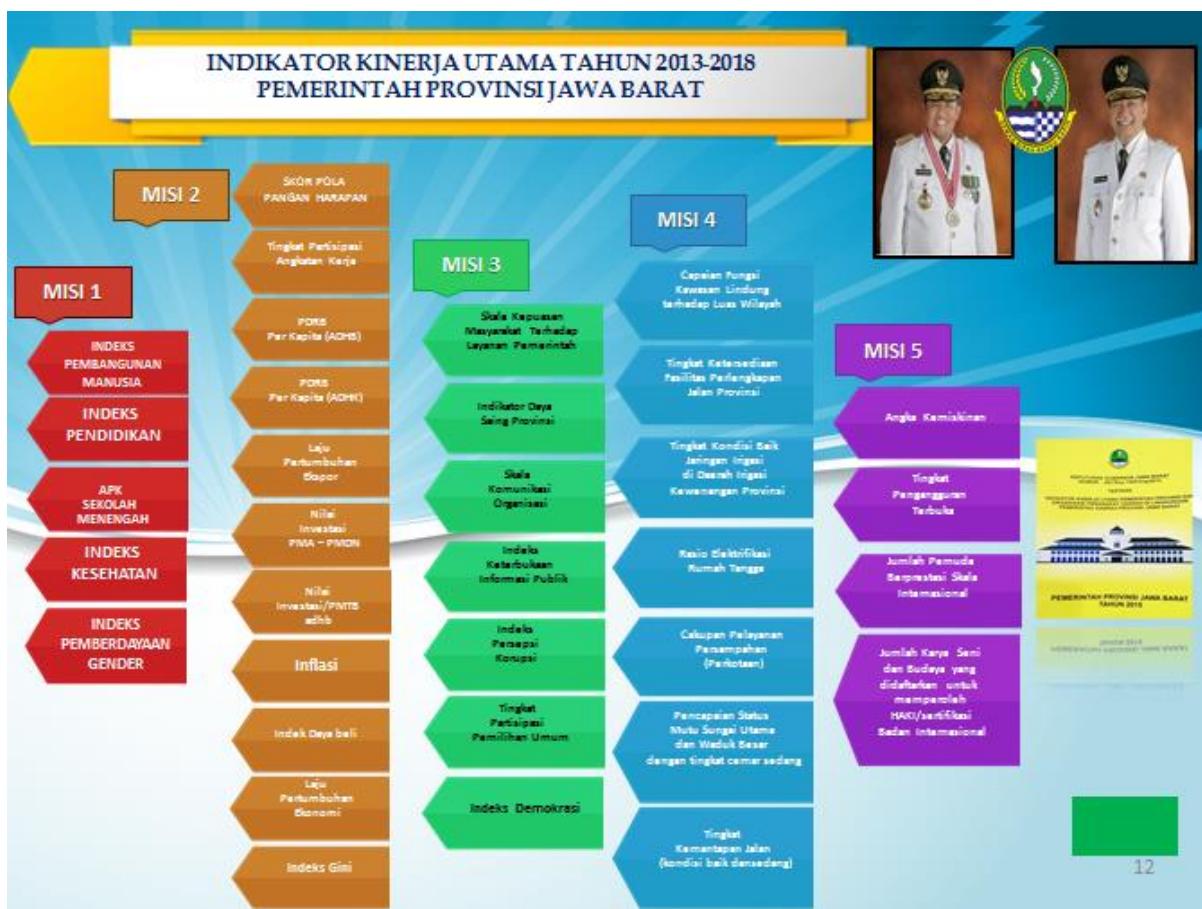
No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	89,87	10,13%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	104,23	73,09	26,91%
3	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	66,83	33,17%
4	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	108,14	80,09	19,91%
6	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	105,69	92,40	7,60%
7	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	164,52	87,19	12,81%
9	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	106,92	80,62	19,38%
10	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu dan Tepat Data	108,59	89,23	10,77%
12	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Jumlah Temuan SPI antar Tahun	100,86	94,12	5,88%

Sumber : eskip.jabarprov.go.id/new

Secara keseluruhan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dijabarkan dalam 10 Program dan 841 Kegiatan rata-rata capaiannya diatas 100% dengan serapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.779.509.648 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 332.151.489.673 sehingga capaian Belanja Langsungnya adalah 93,26.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya terutama dukungan anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana straegis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

3,7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,



Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Keterangan
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1	Persentase kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Pendapatan Asli Daerah"
		2	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	
2	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah"
3	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	4	Persentase Tingkat gangguan jaringan dan sistem	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Indeks Keterbukaan Informasi Publik"
		5	Persentase tingkat gangguan pengguna perangkat keras teknologi informasi	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama akan tercapai.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penyanga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal,

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Badan Pendapatan Daerah meliputi :

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Terdapatnya Cabang-Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi yang tersebarluar diseluruh Kabupaten /Kota se Jawa Barat yang merupakan sub unit

organisasi Badan Pendapatan Daerah disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi,misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah,
2. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip customer relationship” yang makin nyamanMasih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah,
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji,
4. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak masih harus ditingkatkan seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak pada kategori premium, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Bapenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai (contoh: asrama dan fungsi food court);

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat,
4. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru,

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun, kiranya penyusunan LKIP ini dapat memberikan